

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga ..	II-25
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-26
a. Fokus Layanan Urusan Wajib	II-26
b. Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-34
2.1.4. Aspek Daya Saing	II-38
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi	II-38
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-39
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	II-42
2.1.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia	II-42
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-46
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-61
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-61
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II-62
 BAB III	
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Kabupaten Lebak ..	III-1
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017	III-5
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-7
3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	III-8
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-12
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-15

BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN	
	DAERAH	IV-1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
	4.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2017	IV-16
	4.2.1. Tema RKP Tahun 2017	IV-16
	4.2.2. Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2017	IV-17
	4.2.3. Tema dan Prioritas RKPD Kabupaten Lebak Tahun2017	IV-18
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS	
	DAERAH	V-1
BAB VI	PENUTUP	
LAMPIRAN	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017	



Daftar Tabel

		Hal.
Tabel 1	Daftar OPD Penyelenggara Unsur Wajib dan Pilihan	I-10
Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebak	II-2
Tabel 2.2	Ketinggian Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	II-3
Tabel 2.3	Kelerengan Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	II-5
Tabel 2.4	Morfologi Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	II-7
Tabel 2.5	Curah Hujan Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	II-9
Tabel 2.6	Penggunaan Lahan di Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	II-12
Tabel 2.7	Daerah Rawan Bencana Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	II-15
Tabel 2.8	Distribusi PDRB atas dasar harga konstan tahun 2012-2014	II-21
Tabel 2.9	Perkembangan PDRB Kabupaten Lebak ADHK Tahun 2012-2014 (Dalam Juta Rupiah)	II-22
Tabel 2.10	Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Lebak Tahun 2011 - 2015	II-28
Tabel 2.11	Jumlah Fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Lebak Tahun 2010-2015	II-29
Tabel 2.12	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Lebak Tahun 2010-2015	II-34
Tabel 2.13	Perkembangan Produksi Daging di Kabupaten Lebak Tahun 2012 - 2015	II-35



Tabel 2.14	Data luas areal produksi dan produktivitas hasil perkebunan di Kabupaten Lebak tahun 2015	II-36
Tabel 2.15	Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Lebak tahun 2012 - 2015	II-37
Tabel 2.16	Kondisi Jalan di Kabupaten Lebak	II-40
Tabel 2.17	Jumlah Investor di Kabupaten Lebak	II-42
Tabel 2.18	hasil Evaluasi program dan RKPD	II-46
Tabel 2.19	Permasalahan Daerah menurut bidang urusan pemerintah daerah	II-62
Tabel 3.1	Perkiraan Indikator Makro Kabupaten Lebak Tahun 2015	III-5
Tabel 3.2	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2017	III-10
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Belanja Kabupaten Lebak Tahun 2014-2017	III-14
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Belanja Kabupaten Lebak Tahun 2014-2017	III-16
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran	IV-3
Tabel 4.2	Indikator kinerja sasaran untuk setiap misi tahun 2017	IV-6
Tabel 4.3	Sinkronisasi Pembangunan Tahun 2017	IV-21
Tabel 5.1	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017	V-1





BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG :

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Noor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 9 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 (Lembar Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20145);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Daerah.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

BAB II
SISTEMATIKA RKPD

Pasal 2

(1) Sistematika RKPD Tahun Anggaran 2017 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN
LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH

BAB VI PENUTUP

(2) Isi dan uraian RKPD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 27 Mei 2016

BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 27 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2016 NOMOR 13

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

LINA BUDIARTI, S.H.
NIP. 19810228 220502 2 005



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG :

**REVISI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Noor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak

(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 9 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 (Lembar Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20145);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Daerah.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

BAB II
SISTEMATIKA RKPD

Pasal 2

(1) Sistematika RKPD Tahun Anggaran 2017 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN
LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH

BAB VI PENUTUP

(2) Isi dan uraian RKPD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 26 Oktober 2016

BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 26 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2016 NOMOR 61

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

LINA BUDIARTI, S.H.
NIP. 19810228 220502 2 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa esensi dari perencanaan pembangunan merupakan kegiatan dalam menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan berbagai metode dan alur kegiatan yang sistematis dengan melihat kualitas sumber daya yang dimiliki. Bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari dua aspek penting, yaitu merupakan kegiatan perumusan rancangan pembangunan dan sebagai proses yang akan menentukan keberhasilan pembangunan.

Berdasarkan PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan meliputi :

1. **Perencanaan Jangka Panjang**, berupa dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. **Jangka Menengah**, berupa dokumen perencanaan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
3. **Tahunan**, berupa dokumen perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dokumen-dokumen perencanaan tersebut merupakan dokumen perencanaan yang integral dengan

seluruh dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan di tingkat nasional maupun daerah.

Sebagaimana dijelaskan dalam Permen 54 tahun 2010 bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

RPJMD tahun 2014 - 2019 yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD telah mengalami perubahan dengan disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor pada tanggal 24 Oktober 2016 tentang perubahan RPJMD kabupaten Lebak tahun 2014-2019 oleh DPRD kabupaten Lebak sehingga dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2017 yang sebelumnya telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lebak No. 13 tahun 2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Rencana Kerja Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2017 harus dilakukan penyesuaian guna diselaraskan kembali dengan sejumlah perubahan kebijakan daerah yang berkaitan dan atau berdampak terhadap perencanaan pembangunan tahunan dan implementasinya di Kabupaten Lebak.

Dalam konteks Perencanaan pembangunan di Kabupaten Lebak, kebutuhan untuk melakukan penyesuaian RKPD 2017 Kabupaten Lebak didasarkan pada sejumlah pertimbangan yuridis, politis, maupun faktual-substantif sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyusunan RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan melalui melalui Peraturan Bupati Lebak No. 13 tahun 2016 tanggal 27 Mei 2016 masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 sebagai rujukan utamanya, sehingga seiring dengan telah disetujuinya Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Lebak pada tanggal 24 Oktober 2016 tentang perubahan RPJMD kabupaten Lebak tahun 2014-2019, maka sejumlah substansi kebijakan perlu diselaraskan dengan RPJMD Perubahan Tahun 2014-2019 tersebut;
2. Lahirnya sejumlah peraturan secara substantif juga mempengaruhi sejumlah aspek dalam RKPD Tahun 2017, sehingga perlu dikontekstualisasi substansinya antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan kedudukan Perangkat Daerah; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang tentu berdampak langsung terhadap pelaksanaan urusan wajib dan pilihan didalam RKPD tahun 2017.

3. Secara teknis, sesuai dengan Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang perubahan RPJMD kabupaten Lebak tahun 2014-2019 Pasal 4 bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP , memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dengan pendanaanya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan SKPD Penanggungjawab, yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan arah pembangunan. Dokumen RKPD untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai bahan landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). Selain itu RKPD juga merupakan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD yang merupakan dokumen turunan dari Renstra SKPD.

Untuk menjamin Perencanaan pembangunan daerah yang baik, harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- b. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

- c. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- d. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
- e. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- f. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*time*) atau SMART.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Lebak tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan kedudukan Perangkat Daerah
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2014-2019.
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

1.3 Hubungan antar Dokumen

Sebagaimana diatur dalam Permen 54 Tahun 2010, bahwa untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang integral dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan nasional maka RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2017 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Perubahan Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034, mengacu RPJMD dan RTRW Provinsi Banten, serta RPJMN Tahun 2015-2019 dan RTRW Nasional.

Penelaahan sejumlah dokumen perencanaan dan dokumen kebijakan dimaksud diatas dilakukan dalam rangka membangun sinkronisasi dan harmonisasi sehingga diharapkan dapat tercapai keselarasan dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarruang dan antarfungsi pemerintahan, dan antarpemangku kepentingan, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019, dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya. Disamping itu untuk sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dalam penyusunan RKPD juga harus memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja pemerintah (RKP) dan juga prioritas pembangunan pemerintah provinsi Banten yang tertuang dalam RKPD Provinsi Banten.

Sinkronisasi yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan provinsi maupun pusat. Hal ini merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan secara nasional, dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah, nasional dan global. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan bersifat saling mengisi dan melengkapi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang mencakup semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan, perencanaan pembangunan daerah haruslah disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) baik dalam skala lokal, regional maupun nasional. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan sasaran serta target pembangunan di berbagai aspek dan wilayah. Pada gilirannya dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan bermanfaat secara maksimal di setiap wilayah pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2017 merupakan tahun keempat dari Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019, dengan arah kebijakan ***Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Peningkatan Kualitas Pembangunan***. Arah kebijakan pada tahun keempat RPJMD Kabupaten Lebak periode 2014-2019 tersebut diarahkan untuk memperkuat perekonomian Kabupaten Lebak melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi lokal dengan peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi terwujudnya sumberdaya manusia yang unggul dan sejahtera. Tahun keempat ini juga diarahkan untuk memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan

terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah.

1.4 Sistematikan Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2017, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang Penyusunan RKPD, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penyusunan RKPD serta Maksud dan Tujuan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Memuat hasil Evaluasi dari Gambaran Umum Kondisi Daerah meliputi : Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini berisi tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah meliputi Kondisi Ekonomi Daerah, Tantangan dan Proses Perekonomian Daerah. Arah Kebijakan Keuangan Daerah meliputi Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan serta Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Hasil Analisis terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja yang Direncanakan dalam RPJMD, Identifikasi Isu Strategis dan Masalah Mendesak di Tingkat Daerah dan Nasional, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaannya.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH



Bab ini mengemukakan rincian Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang Disusun Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahunan, Kedudukan Tahun Rencana (RKPD) dan Capaian Kinerja yang Direncanakan dalam RPJMD yang disajikan dengan tabel.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menyajikan rangkuman kesimpulan isi dari RKPD dan pointer harapan - harapan yang berkenaan dengan disusunnya buku RKPD tahun 2015.

1.5 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk :

- a. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017. KUA dan PPAS yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2017.

Tujuan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 yaitu :

- 1) Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan daerah;
- 2) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
- 3) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, perguruan tinggi dan *stake holders* pembangunan lainnya;
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.6 Kewenangan Pemerintah Daerah

Kebijakan nasional lainnya yang secara signifikan mempengaruhi dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara teknis didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kebijakan tersebut telah merevisi baik substansi maupun nomenklatur kewenangan daerah yang sebelumnya diatur melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Adapun pembagian kewenangan yang terbaru tersebut terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang secara detail adalah sebagai berikut :

1. **Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar** terdiri atas: bidang ;
 - a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan f. sosial.
2. **Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar** terdiri atas: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan
3. **Urusan Pemerintahan Pilihan** terdiri atas: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi
4. **Unsur Penunjang urusan Pemerintahan**, terdiri atas : a. perencanaan, b. keuangan, c kepegawaian serta pendidikan dan latihan, serta penelitian dan pengembangan.

Dijelaskan juga dalam UU No. 23 Tahun 2014 bahwa terdapat kewenangan yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten, selanjutnya dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pengalihan kewenangan tersebut secara umum yaitu Pendidikan Menengah, kelautan, Kehutanan dan Energi Sumber Daya.

1.7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Selain mengatur kembali kewenangan daerah, UU No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juga mengamanatkan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru sehingga perlu menyelaraskan dokumen perencanaan daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan kedudukan Perangkat Daerah.

OPD yang menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dijelaskan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Daftar OPD Penyelenggara Urusan Wajib dan Pilihan

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SKPD
I	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan RSUD Dr. Adjidarmo
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	Ketentraman dan Ketertiban	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Sosial	Dinas Sosial
II	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
3	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
4	Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
9	Perhubungan	Dinas Perhubungan
10	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Koperasi, Usaha Kecil dan	Dinas Koperasi dan UKM

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SKPD
12	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
14	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
18	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
III	URUSAN PILIHAN	
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
2	Pariwisata	Dinas Pariwisata
3	Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
4	Kehutanan	-
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	-
6	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
IV	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN	
1	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Pengawasan	Inspektorat
6	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD
7	Fungsi Penunjang Lainnya	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kecamatan Rangkasbitung Kecamatan Cibadak Kecamatan Warunggunung Kecamatan Maja Kecamatan Cipanas Kecamatan Muncang Kecamatan Leuwidamar Kecamatan Bojongmanik Kecamatan Cijaku Kecamatan Malingping Kecamatan Panggarangan Kecamatan Bayah Kecamatan Cibeber

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SKPD
		Kecamatan Gunung Kencana
		Kecamatan Sajira
		Kecamatan Cikulur
		Kecamatan Cileles
		Kecamatan Cimarga
		Kecamatan Banjarsari
		Kecamatan Curugbitung
		Kecamatan Sobang
		Kecamatan Wanasalam
		Kecamatan Cilograng
		Kecamatan Cirinten
		Kecamatan Kalanganyar
		Kecamatan Cigemblong
		Kecamatan Lebakgedong
		Kecamatan Cihara



BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

Kabupaten Lebak terletak di antara 6°18' - 7°00' Lintang Selatan dan 105°25' - 106°18' Bujur Timur. Dengan bentang alam yang cukup luas tersebut Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah mencapai 330.507,16 hektar atau sekitar 3.305,07 km². Luas wilayah Kabupaten Lebak ini mencapai kurang lebih 34,20% dari luas Provinsi Banten.

Kabupaten Lebak terletak di bagian Selatan Provinsi Banten, yang bersebelahan dengan Kabupaten Pandeglang di batas bagian Baratnya. Bentuk wilayah yang membujur dari Utara ke Selatan, menghubungkan Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Serang dan sebagian dengan Kabupaten Tangerang di batas bagian Utaranya. Di bagian Timurnya berbatasan dengan dua kabupaten paling barat Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Sementara pada bagian Selatannya, Kabupaten Lebak terkoneksi langsung dengan Samudera Indonesia sehingga memiliki wilayah laut sekitar 588.745 km² dengan panjang pantai mencapai 91,42 km.

Secara administratif Kabupaten Lebak dibagi dalam 28 kecamatan, terdiri dari 340 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan Cibeber merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu sekitar 40.096,41 Ha atau sekitar 12,13% dari luas wilayah Kabupaten Lebak. Cibeber juga merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak, yaitu 22 desa. Sementara kecamatan dengan luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Kalanganyar yang hanya sekitar 0,87% dari luas wilayah Kabupaten Lebak, atau sekitar 2.859,34 Ha. Kalanganyar juga termasuk kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit (7), setelah Kecamatan Lebakgedong.

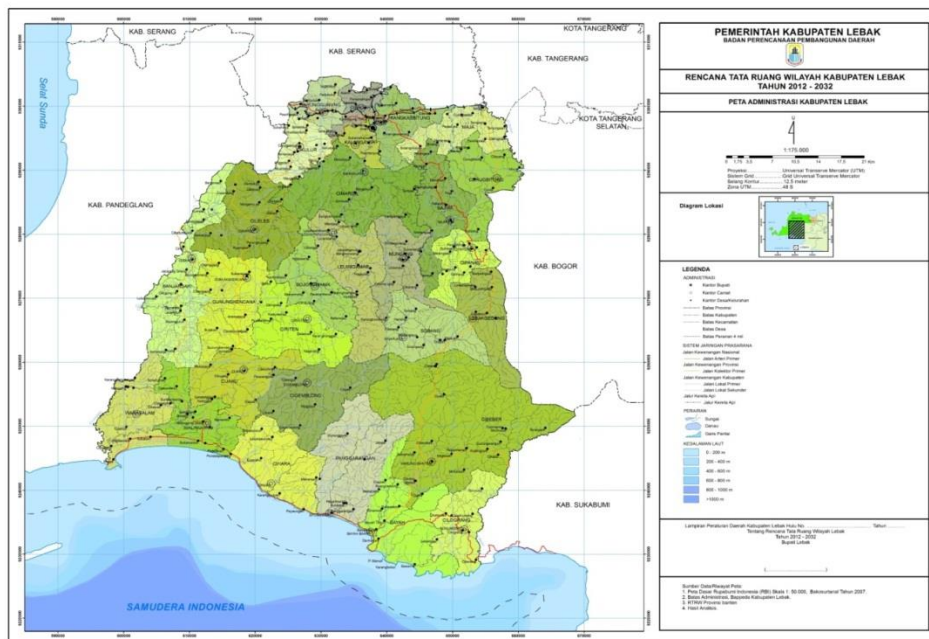
Tabel 2.1 memberikan gambaran tentang rincian jumlah desa/kelurahan dan luas wilayah serta persentase luas wilayah masing-masing kecamatan dimaksud di atas.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebak

No.	Kecamatan	Jumlah	Luas (Ha)	Persentase
1	Malingping	14	10.201,47	3,09
2	Wanasalam	13	11.419,02	3,45
3	Panggarangan	11	17.715,51	5,36
4	Bayah	11	14.377,21	4,35
5	Cilograng	10	9.601,71	2,91
6	Cibeber	22	40.096,41	12,13
7	Cijaku	10	11.468,42	3,47
8	Banjarsari	20	15.955,50	4,83
9	Cileles	12	15.338,76	4,64
10	Gunungkencana	12	13.801,50	4,18
11	Bojongmanik	9	9.591,83	2,90
12	Leuwidamar	12	14.305,09	4,33
13	Muncang	12	8.695,38	2,63
14	Sobang	10	11.149,34	3,37
15	Cipanas	14	6.525,30	1,97
16	Sajira	15	10.466,64	3,17
17	Cimarga	17	18.752,65	5,67
18	Cikulur	13	6.182,97	1,87
19	Warunggunung	12	4.736,53	1,43
20	Cibadak	15	3.632,71	1,10
21	Rangkasbitung	16	7.309,70	2,21
22	Maja	14	7.817,14	2,37
23	Curugbitung	10	9.317,33	2,82
24	Cihara	9	12.469,86	3,77
25	Cigemblong	9	15.304,93	4,63
26	Cirinten	10	12.254,95	3,71
27	Lebakgedong	6	9.159,98	2,77
28	Kalanganyar	7	2.859,34	0,87

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Gambar 2.1
Peta Administratif Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Secara topografi, keadaan Kabupaten Lebak cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah di bagian utara dan selatan, dengan ketinggian berkisar antara 100 meter hingga di atas 1.000 meter dari permukaan laut. Daerah dengan ketinggian antara 100 sampai 500 meter di atas permukaan laut meliputi sekitar 80%, kawasan yang berada pada ketinggian 500 sampai 1.000 meter meliputi 16 % dan kawasan yang berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter sekitar 4% dari luas keseluruhan Kabupaten Lebak. Ketinggian wilayah di Kabupaten Lebak dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelas ketinggian, yaitu :

1. Ketinggian antara 100-500 meter di atas permukaan air laut, tersebar di Kecamatan Banjarsari, Bayah, Bojongmanik, Cibadak, Cibeber, Cigemblong, Cihara, Cijaku, Cikulur, Cileles, Cilograng, Cimarga, Cipanas, Cirinten, Curugbitung, Gunungkencana, Kalanganyar, Lebakgedong, Malingping, Muncang, Panggarangan, Rangkasbitung, Maja, Wanasalam, Warunggunung, dan Kalanganyar.
2. Ketinggian antara 500-1.000 meter di atas permukaan air laut, tersebar di sebagian Kecamatan Bayah, Bojongmanik, Cibeber, Cigemblong, Cijaku, Cileles, Cilograng, Cipanas, Cirinten, Gunungkencana, Lebakgedong, Leuwidamar, Panggarangan, Muncang, Sajira dan Sobang.
3. Ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan air laut, tersebar di sebagian kecil Kecamatan Cibeber, Cipanas, Lebakgedong, Muncang dan Sobang.

Keadaan topografi Kabupaten Lebak berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

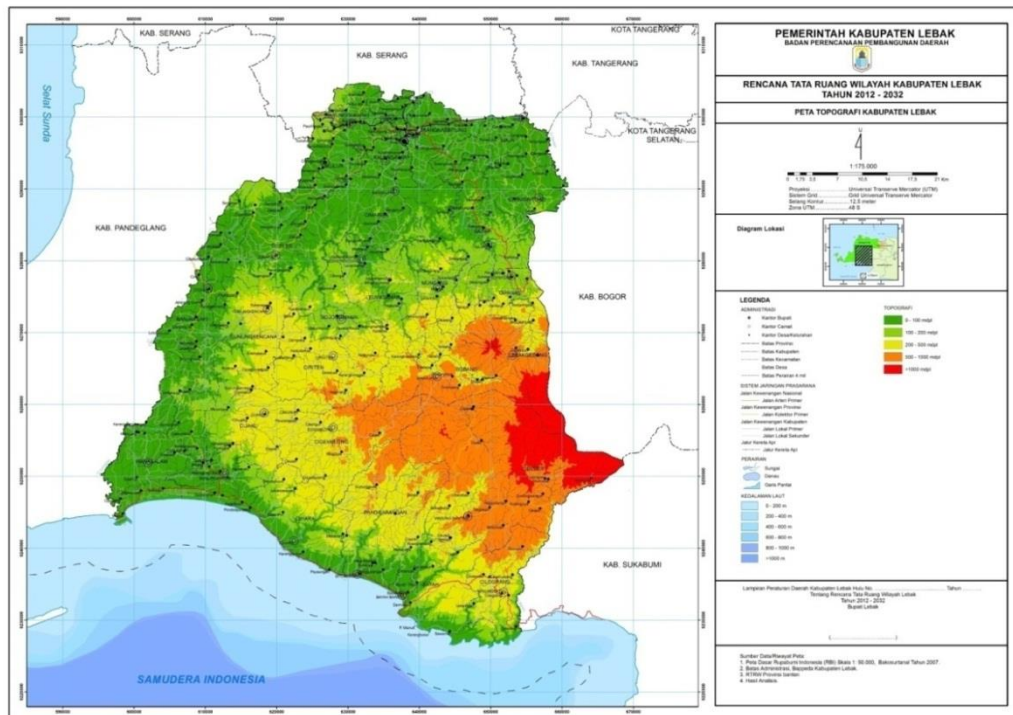
Tabel 2.2
Ketinggian Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Topografi (Ketinggian Wilayah) (mdpl)					Luas (Ha)
		0-100	100-200	200-500	500-	>1000	
1.	Banjarsari	13.803,26	2.152,24				15.955,50
2.	Bayah	5.117,26	3.505,48	5.415,04	339,43		14.377,21
3.	Bojongmanik	552,81	5.194,13	3.720,09	124,81		9.591,83
4.	Cibadak	3.632,71					3.632,71
5.	Cibeber	16,30	249,71	4.926,78	26.021,80	8.881,82	40.096,41
6.	Cigemblong		87,54	9.973,54	5.243,85		15.304,93
7.	Cihara	4.319,76	3.941,22	4.208,88			12.469,86
8.	Cijaku	406,48	2.776,55	8.178,88	106,50		11.468,42
9.	Cikulur	5.575,09	607,88				6.182,97

No	Kecamatan	Topografi (Ketinggian Wilayah) (mdpl)					Luas (Ha)
		0-100	100-200	200-500	500-	>1000	
10.	Cileles	10.701,09	4.531,52	105,83	0,32		15.338,76
11.	Cilograng	701,11	1.498,86	5.156,48	2.245,27		9.601,72
12.	Cimarga	15.794,41	2.786,21	172,03			18.752,65
13.	Cipanas	41,18	3.827,86	1.691,63	909,00	55,64	6.525,30
14.	Cirinten		403,06	10.512,94	1.338,96		12.254,96
15.	Curugbitung	7.141,83	2.167,20	8,30			9.317,33
16.	Gunungkencana	1.810,40	4.980,38	7.008,88	1,85		13.801,50
17.	Kalanganyar	2.859,34					2.859,34
18.	Lebakgedong		126,46	2.761,35	3.579,16	2.693,02	9.159,98
19.	Leuwidamar	2.199,13	6.384,99	4.165,87	1.555,10		14.305,09
20.	Maja	7.817,14					7.817,14
21.	Malingping	8.447,82	1.636,43	117,22			10.201,47
22.	Muncang	384,54	3.664,69	4.078,26	509,87	58,02	8.695,38
23.	Panggarangan	2.934,25	1.780,78	9.833,92	3.166,57		17.715,51
24.	Rangkasbitung	7.309,67	0,004				7.309,71
25.	Sajira	5.379,68	4.049,49	1.020,92	16,55		10.466,64
26.	Sobang			3.730,04	6,731,65	687,65	11.149,34
27.	Wanasalam	11.408,40	10,62				11.419,02
28.	Warunggunung	3.048,09	1.688,44				4.736,53
	Jumlah	121.401,	58.051,76	86.786,8	51.890,6	12.376,1	330.507,1

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Gambar 2.2
Peta Kondisi Topografi Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Kabupaten Lebak berdasarkan lerengnya terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu :

1. 0 - 2%, tersebar di bagian selatan, barat dan utara Kabupaten Lebak,
2. 2 - 5%, tersebar di bagian selatan, barat dan utara Kabupaten Lebak,
3. 5 - 15%, terletak di bagian tengah dan selatan kearah timur kabupaten Lebak,
4. 15 - 25%, terletak di bagian tengah dan selatan kearah timur kabupaten Lebak,
5. 25 - 40%, terletak di bagian timur kabupaten Lebak,
6. >40%, terletak di bagian timur kabupaten Lebak.

Tabel 2.3

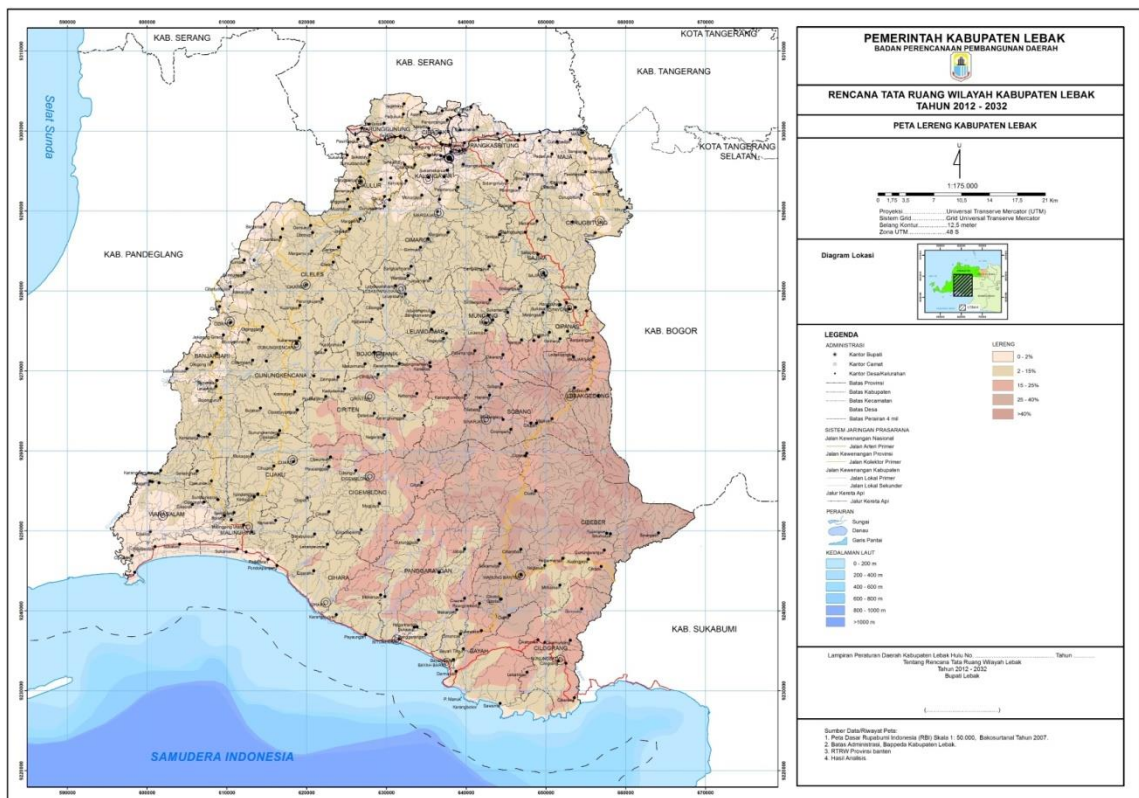
Kelerengan Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Lereng (Kemiringan Lahan)					Total
		0-2%	2-15%	15-25%	25-40%	>40%	
1.	Banjarsari	5.625,57	10.329,93				15.955,50
2.	Bayah	996,36	5.453,14	6.415,99	1.511,72		14.377,21
3.	Bojongmanik		7.464,43	2.127,41			9.591,83
4.	Cibadak	3.134,19	498,53				3.632,71
5.	Cibeber		2.672,42	6.235,67	23.887,95	7.300,37	40.096,41
6.	Cigemblong		7.416,31	5.511,57	2.377,06		15.304,93
7.	Cihara	689,76	9.256,39	2.523,71			12.469,86
8.	Cijaku		10.382,92	1.085,49			11.468,42
9.	Cikukur	2.351,74	3.831,23				6.182,97
10.	Cileles	1.168,34	14.170,41				15.338,76
11.	Cilograng	177,61	2.693,58	6.034,87	695,66		9.601,72
12.	Cimarga	1.686,40	16.663,10	403,15			18.752,65
13.	Cipanas		4.703,95	1.065,33	509,94	246,08	6.525,30
14.	Cirinten		9.237,10	2.907,03	110,83		12.254,96
15.	Curugbitung	1.892,77	7.424,56				9.317,33
16.	Gunungkencana	144,93	13.656,57				13.801,50
17.	Kalanganyar	1.817,11	1.042,23				2.859,34
18.	Lebakgedong		56,69	3.510,67	3.614,18	1.978,43	9.159,98
19.	Leuwidamar		9.989,00	3.378,52	921,99	15,59	14.305,09
20.	Maja	5.199,86	2.617,28				7.817,14
21.	Malingping	3.501,62	6.699,84				10.201,47
22.	Muncang		3.709,38	2.795,32	1.453,04	737,64	8.695,38
23.	Panggarangan	604,33	7.677,02	8.320,45	1.075,05	38,67	17.715,51

No.	Kecamatan	Lereng (Kemiringan Lahan)					Total
		0-2%	2-15%	15-25%	25-40%	>40%	
24.	Rangkasbitung	4.573,24	2.736,47				7.309,71
25.	Sajira	637,24	9.229,80	599,60			10.466,64
26.	Sobang			1.852,88	7.452,98	1.843,48	11.149,34
27.	Wanasalam	7.933,32	3.485,70				11.419,02
28.	Warunggunung	2.994,66	1.741,87				4.736,53
	Jumlah	45.129,04	174.839,83	54.767,64	43.610,41	12.160,25	330.507,16

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Gambar 2.3
Peta Kondisi Kelerengan di Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Morfologi Kabupaten Lebak dapat dibagi menjadi dataran, perbukitan (landai, bergelombang, terjal) dan gunung/pegunungan.

1. Dataran, tersebar di bagian, utara, barat dan selatan Kabupaten Lebak,
2. Perbukitan landai, tersebar di bagian selatan dan utara kearah timur Kabupaten Lebak,

3. Perbukitan bergelombang, terletak di bagian tengah dan selatan kearah timur Kabupaten Lebak,
4. Perbukitan terjal, terletak di bagian tengah kearah timur Kabupaten Lebak
5. Gunung/Pegunungan, 40%, terletak di bagian timur kabupaten Lebak.

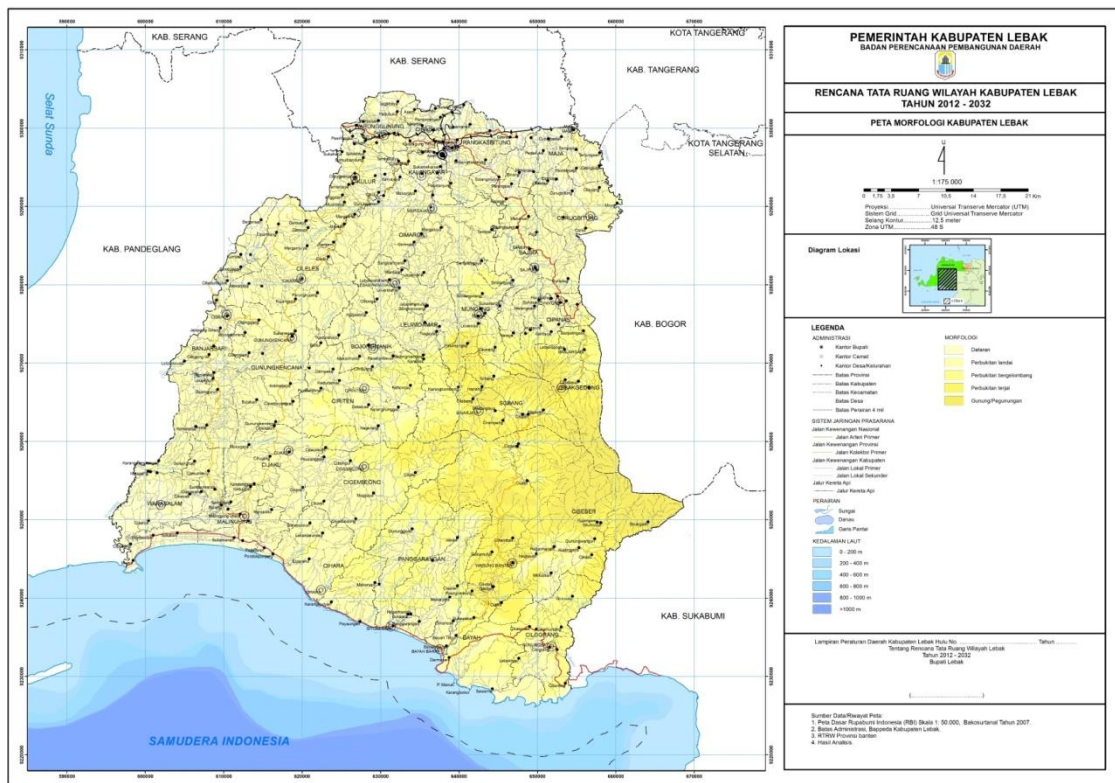
Tabel 2.4

Morfologi Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Morfologi					Total
		Dataran	Perbukitan Landai	Perbukitan Bergelombang	Perbukitan Terjal	Gunung / Pegunungan	
1.	Banjarsari	12.991,70	2.963,80				15.955,50
2.	Bayah	2.476,88	4.080,35	6.327,09	1.492,89		14.377,21
3.	Bojongmanik	919,7	8.672,13	2.129,68			9.591,83
4.	Cibadak	3.632,71					3.632,71
5.	Cibeber		6.672,81	6.937,13	23.146,62	3.339,85	40.096,41
6.	Cigemblong	1.402,49	6.135,77	7.405,49	361,18		15.304,93
7.	Cihara	4.109,21	6.139,71	2.220,94			12.469,86
8.	Cijaku	6.529	3.864,06	1.075,36			11.468,42
9.	Cikukur	5.348,01	834,96				6.182,97
10.	Cileles	9.654,26	5.684,50				15.338,76
11.	Cilograng	287,05	2.491,95	6.115,35	554,53	152,83	9.601,71
12.	Cimarga	12.204,30	6.303,76	144,55	100,04		18.752,65
13.	Cipanas	1.958,40	3.171,84	1.316,37	78,69		6.525,30
14.	Cirinten	1.873,62	7.331,17	3.050,16			12.254,95
15.	Curugbitung	8.501,69	815,64				9.317,33
16.	Gunungkencana	5.959,78	7.711,72	130,00			13.801,50
17.	Kalanganyar	2.838,78	20,56				2.859,34
18.	Lebakgedong		755,61	3.565,86	4.494,47	344,04	9.159,98
19.	Leuwidamar	2.191,89	7.808,94	4.113,38	141,60	49,28	14.305,09
20.	Maja	7.806,53	10,61				7.817,14
21.	Malingping	8.701,25	1.500,22				10.201,47
22.	Muncang	1.443,60	3.001,81	1.965,70	1.484,24	800,03	8.695,38
23.	Panggarangan	1.679,7	6.603,64	8.676,97	685,80	69,40	17.715,51
24.	Rangkasbitung	6.870,18	439,53				7.309,70
25.	Sajira	6.661,87	3.252,66	547,99	4,12		10.466,64
26.	Sobang		533,74	2.559,46	6.749,82	1.306,32	11.149,34
27.	Wanasalam	11.419,02					11.419,02
28.	Warunggunung	4.548,36	188,17				4.736,53
	Jumlah	132.009,98	96.989,65	56.151,80	39.294,00	6.061,75	330.507,16

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Gambar 2.4
Peta Morfologi Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Secara hidrologi, Kabupaten Lebak memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Ciujung yang meliputi Sungai Ciujung, Sungai Cilaki, Sungai Ciberang, dan Sungai Cisimeut; serta DAS Ciliman - Cimadur yang meliputi Sungai Ciliman dengan anak sungainya, Sungai Cimadur, Sungai Cibareno, Sungai Cisiih, Sungai Cihara, Sungai Cipager, dan Sungai Cibaliung.

Sungai Ciujung merupakan sungai terbesar di Provinsi Banten, yang melewati 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang. Mata air Sungai Ciujung sangat dilindungi oleh Masyarakat Adat Kanekes karena berada di kawasan hutan Sasaka Buana atau Pada Ageung di bagian selatan kampung Cikeusik dan hutan sakral Sasaka Domas di kawasan hulu Sungai Ciparahiang anak Sungai Ciujung, bagian selatan Kampung Cibeo, Baduy dalam. Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Ciujung mencapai kurang lebih 1850 km² dan panjang mencapai 142 km hingga bermuara di Teluk Pontang Kabupaten Serang, Pantai Utara Laut Jawa. DAS Ciujung terdiri dari tiga anak sungai utama yaitu: Sungai Cisimeut dengan luas Sub DAS mencapai 458 km²,

Sungai Ciberang dengan luas Sub DAS 304 km², Sungai Ciujung Hulu dengan luas Sub DAS 594 km² dan anak sungai lainnya yang lebih kecil berada disebelah hilir kota Rangkasbitung yaitu Sungai Cikambuy, Sungai Cisangu, Sungai Ciasem, Sungai Cibongor dan Sungai Ciyapah.

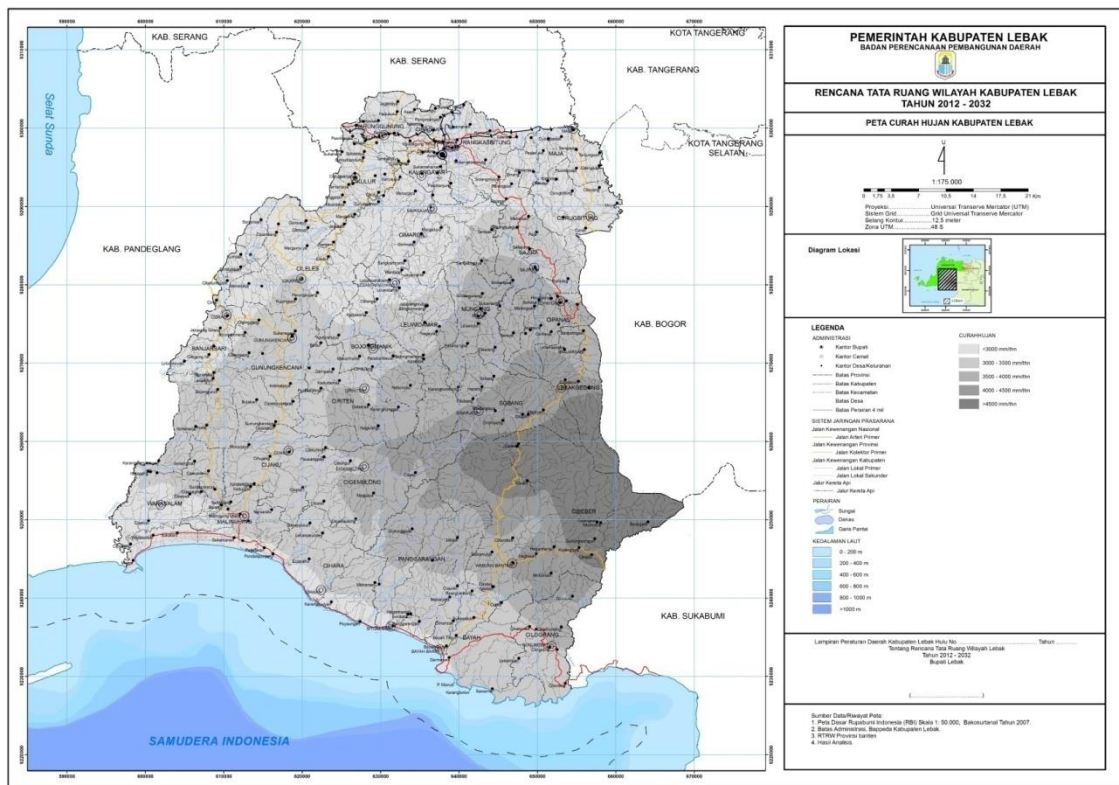
Berdasarkan klimatologi, Kabupaten Lebak memiliki curah hujan yang tinggi yaitu berkisar antara 2000 - >5000 mm/tahun. Curah hujan terbesar berada di bagian timur sedangkan terkecil berada di bagian utara Kabupaten Lebak. Komposisi luasan curah hujan per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5
Curah Hujan Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Curah Hujan					Total
		<3000 mm/thn	3000-3500 mm/thn	3500-4000 mm/thn	4000-4500 mm/thn	>4500 mm/thn	
1.	Banjarsari	8.865,94	7.089,57				15.955,50
2.	Bayah	785,13	12.225,23	1.356,53	10,32		14.377,21
3.	Bojongmanik	1.845,33	5.293,18	2.453,32			9.591,83
4.	Cibadak	3.632,71					3.632,71
5.	Cibeber		805,91	5.205,61	11.685,72	22.399,17	40.096,41
6.	Cigemblong		5.050,35	6.644,39	3.610,20		15.304,93
7.	Cihara	3.606,75	8.859,12	3,99			12.469,86
8.	Cijaku		10.373,16	1.095,25			11.468,42
9.	Cikukur	6.182,97					6.182,97
10.	Cileles	12.531,75	2.807,01				15.338,76
11.	Cilograng		4.826,32	3.372,11	1.403,28		9.601,71
12.	Cimarga	15.344,13	2.539,06	869,47			18.752,65
13.	Cipanas		346,96	5.384,33	794,01		6.525,30
14.	Cirinten		6.145,69	5.830,76	278,51		12.254,95
15.	Curugbitung	7.773,78	1.543,55				9.317,33
16.	Gunungkencana	770,79	13.030,71				13.801,50
17.	Kalanganyar	2.859,34					2.859,34
18.	Lebakgedong			2.997,51	2.735,16	3.427,31	9.159,98
19.	Leuwidamar	3.375,11	5.454,19	4.424,08	1.051,71		14.305,09
20.	Maja	7.817,14					7.817,14
21.	Malingping	3.441,11	6.760,36				10.201,47
22.	Muncang	23,33	1.147,15	7.126,99	397,91		8.695,38
23.	Panggarangan	1.234,87	6.452,89	8.794,67	1.233,09		17.715,51
24.	Rangkasbitung	7.309,70					7.309,70
25.	Sajira	2.095,56	4.884,02	3.487,06			10.466,64
26.	Sobang			2.368,49	7.192,33	1.588,53	11.149,34
27.	Wanasalam	7.894,92	3.524,10				11.419,02
28.	Warunggunung	4.736,53					4.736,53
	Jumlah	102.126,88	109.158,50	61.414,54	30.392,23	27.415,00	330.507,16

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Gambar 2.5
Peta Curah Hujan Kabupaten Lebak



Penggunaan Lahan di Kabupaten Lebak di secara umum didominasi oleh kebun campuran, perkebunan (rakyat dan swasta), persawahan (irigasi dan tadah hujan) dengan rincian pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.6
Penggunaan Lahan di Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

Kecamatan	Penggunaan Lahan																Total (Ha)
	Hutan Belukar	Hutan Lebat	Kampung	Kebun Campuran	Padang Rumput/Sabana	Perkebunan Besar	Perkebunan Rakyat	Perumahan	Rawa	Sawah Irigasi 1xpadi/th	Sawah Irigasi 2xpadi/th	Sawah Tadah Hujan	Semak	Sungai/Danau	Tanah Rusak	Tegalan/Ladang	
Banjarsari	2,575.40		713.90	7,895.27	136.89	231.86	1,238.76		1.91	944.81	1,457.96	0.00	421.64	132.64		204.46	15,955.50
Bayah	2,876.13		770.39	7,155.95	0.52	494.35	1,542.38			1,004.82	123.72			141.43	0.30	267.23	14,377.21
Bojongmanik	644.03		192.11	1,762.14	0.69		5,457.05			1,119.09	228.94			72.97		114.82	9,591.83
Cibadak			389.97	1,456.38	18.30		203.55		5.81	5.63	1,493.74			59.35			3,632.71
Cibeber	14,771.86	702.33	374.00	20,171.70	6.65		2,033.63			1,588.96	19.88	0.01		93.25	1.34	332.81	40,096.41
Cigemblong	2,883.52	294.42	146.69	9,191.74	9.26	373.93				1,590.64	652.63			36.53		125.59	15,304.93
Cihara	1,334.25		190.09	9,228.02						1,194.37	80.17		70.61	59.57		312.78	12,469.86
Cijaku	766.99		213.69	7,854.70	1.96		835.56			1,062.28	718.45		0.41	6.26		8.12	11,468.42
Cikukur			493.66	533.40	12.64		2,868.29			411.85	1,828.45			34.70			6,182.97
Cilleles	1,728.06		476.76	8,165.05	7.39	1,448.59	1,669.07			1,244.27	425.93			39.55		134.09	15,338.76
Cilograng	4,332.57		255.23	3,990.42			213.92			457.89	80.49			43.39		227.81	9,601.72
Cimarga	3,936.36		572.10	3,264.82	24.41	2,603.51	4,489.63			2,038.27	1,430.38			232.42		160.74	18,752.65
Cipanas	97.80	126.42	290.35	3,856.88	3.67	0.09	81.08			1,356.23	625.59	0.15	0.03	81.07	5.96		6,525.30
Cirinten	411.22	87.77	155.94	8,543.38	0.44		675.58			996.88	1,132.24			14.22		237.29	12,254.96
Curugbitung			481.86	5,587.48		0.07	1,223.19			164.82	1,732.64	51.84	0.08	46.72		28.62	9,317.33
Gunungkencana	4,414.29		377.33	5,581.55	1.38		1,067.00			1,217.44	700.39		107.86	40.30		293.95	13,801.50
Kalanganyar			229.96	998.95		489.96				128.42	794.88			75.41		141.77	2,859.34
Lebakgedong		291.38	104.56	6,491.70		0.03	390.10			725.40	80.45	0.00	0.03	32.43		1,043.90	9,159.98
Leuwidamar	1,618.42	201.52	451.01	2,500.83	10.60		7,724.19			947.63	386.20			129.18		335.50	14,305.09
Maja			645.53	2,676.29	15.06	1,203.90	663.72			314.80	2,147.90			76.61		73.32	7,817.14
Malingping	685.85		557.15	5,405.13	9.13		620.29		95.78	1,480.47	572.08		630.86	64.36	61.55	18.82	10,201.47
Muncang	168.46	122.47	159.05	2,711.22		258.32	2,166.30			2,106.14	699.85			80.20		223.35	8,695.38
Pangarangan	5,937.06		263.55	7,098.42	1.17		2,848.43			975.39	409.23			181.74		0.53	17,715.51
Rangkasbitung			933.24	2,016.75	67.55	2,526.79		84.38		240.73	1,314.24			104.47		21.55	7,309.71
Sajira	29.62		395.31	6,434.43	35.86	231.87	1,151.50			552.16	1,495.37			140.51			10,466.64
Sobang	1,106.89	1,308.57	131.79	4,946.75			716.92			2,813.84				68.31		56.27	11,149.34
Wanasalam	57.29		358.82	4,562.66	10.16		1,498.33		16.89	233.24	3,687.34		710.93	118.04	165.31	0.03	11,419.02
Warunggunung			460.08	1,201.46	4.01		959.64			9.52	2,101.82						4,736.53

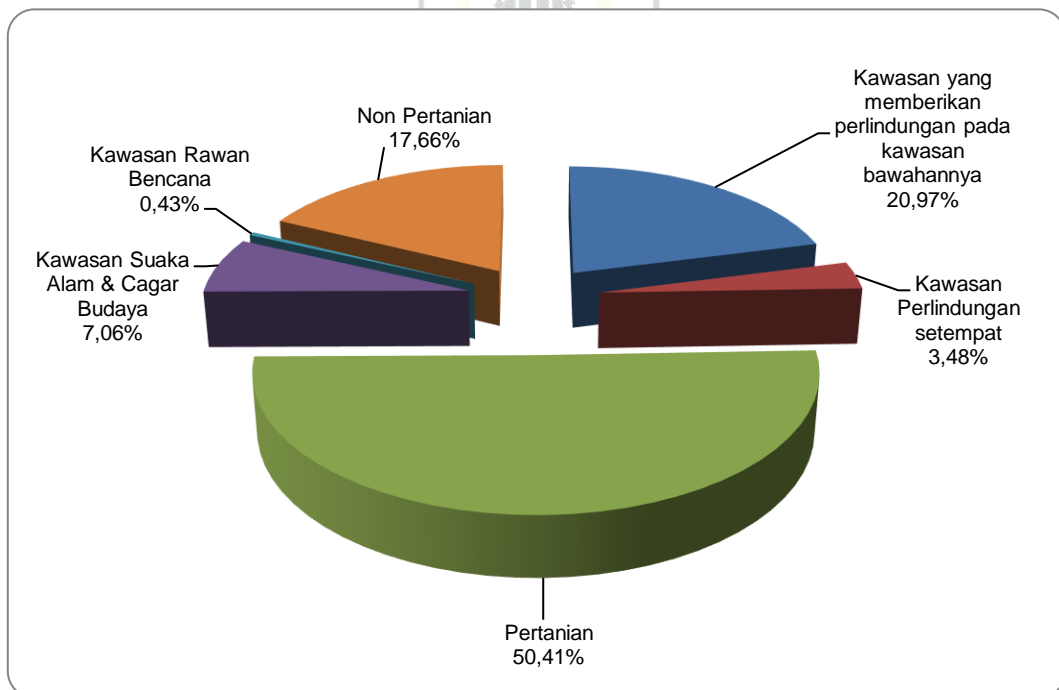


a. Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan karakteristik wilayahnya, wilayah kabupaten Lebak diatur sedemikian rupa pola pemanfaatan ruangnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak, yang meliputi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Luas kawasan budidaya mencakup mencapai 207.250 Ha yang terdiri dari kawasan budidaya pertanian seluas 153.485 Ha dan kawasan budidaya non pertanian seluas 53.765 Ha. Sedangkan luas kawasan lindung mencapai 97.222 Ha yang terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya seluas 63.845 Ha, kawasan perlindungan setempat seluas 10.595 Ha, kawasan suaka alam dan cagar budaya seluas 21.482 Ha, serta kawasan rawan bencana gerakan tanah dengan luas 1.300 Ha. Pola pemanfaatan ruang sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.1

Persentase Luas Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lebak



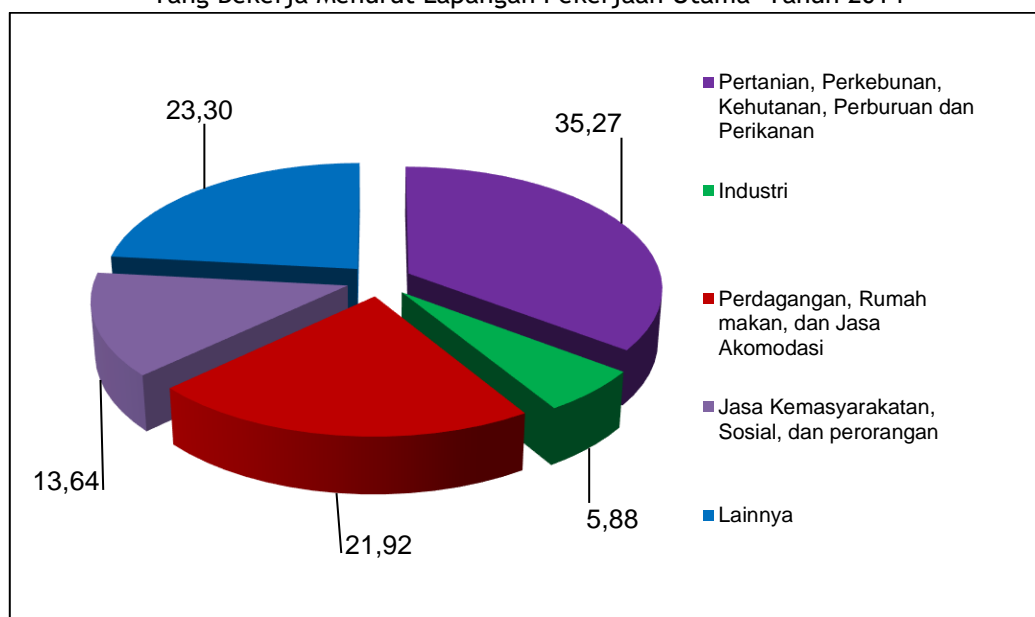
Sumber : Diolah dari RTRW Kabupaten Lebak 2014-2034

Berdasarkan pola pemanfaatan ruang yang sebagian besar merupakan kawasan pertanian budidaya, maka Kabupaten Lebak adalah daerah yang dalam jangka menengah masih akan mengandalkan sektor pertanian sebagai

penggerak utamanya bagi pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pertanian tanaman pangan yang potensial bahkan tersebar di hampir seluruh kecamatan, menjadikan Kabupaten Lebak memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan dalam konteks regional di Provinsi Banten. Terkait dengan ini maka potensi pengembangan industri berbasis pemanfaatan hasil-hasil pertanian memiliki prospek yang sangat tinggi. Demikian pula dengan potensi industri pariwisata, perdagangan, serta UMKM dan Koperasi yang masih dapat terus ditingkatkan dengan mengoptimalkan produk-produk pertanian setempat, sehingga terdapat integrasi yang nyata antara upaya meningkatkan kapasitas perekonomian daerah di satu sisi dengan upaya memberdayakan potensi ekonomi masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Implikasi dari konstruksi alamiah pola pemanfaatan ruang di Kabupaten Lebak, maka sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Data BPS dibawah ini mengkonfirmasi persentase penduduk yang bekerja di sektor ini mencapai 64,69%. Gambaran lengkap tentang sebaran mata pencaharian penduduk Kabupaten Lebak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Grafik 2.2
Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas
Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2014



Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2015

Di samping pertanian, sektor non pertanian yang cukup menonjol di Kabupaten Lebak adalah sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi. Sektor ini berkembang seiring meningkatnya ragam potensi pariwisata masih dapat dioptimalkan, seperti: wisata alam pantai di Kecamatan Malingping, Panggarangan, dan Bayah; wisata alam lainnya Lebak Gedong (arung jeram) dan pemandian air panas di Cipanas. Demikian pula dengan potensi wisata budaya yang menjadi ikon Kabupaten Lebak, yang dapat ditemui pada Masyarakat Adat Cisungsang dan Citorek, Masyarakat Adat Kanekes, serta situs purbakala Kosala atau Lebak Sangka Kosala di Desa Lebak Gedong yang merupakan peninggalan tradisi megalitik berbentuk bangunan punden berundak dan menhir di tiap undakannya yang berjumlah lima; dan situs megalitik Cibedug yang terletak di Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber.

b. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana yang ada di Kabupaten Lebak meliputi :

1. Wilayah rawan bencana tsunami, terletak di bagian selatan (berbatasan dengan Samudera Indonesia) Kabupaten Lebak;
2. Daerah rawan tergenang (banjir), terletak di bagian barat daya dan utara Kabupaten Lebak;
3. Daerah rawan longsor, berada di bagian tengah Kabupaten Lebak; dan
4. Wilayah yang relatif aman dari bencana alam berada di bagian barat dan utara Kabupaten Lebak.

Tabel 2.7

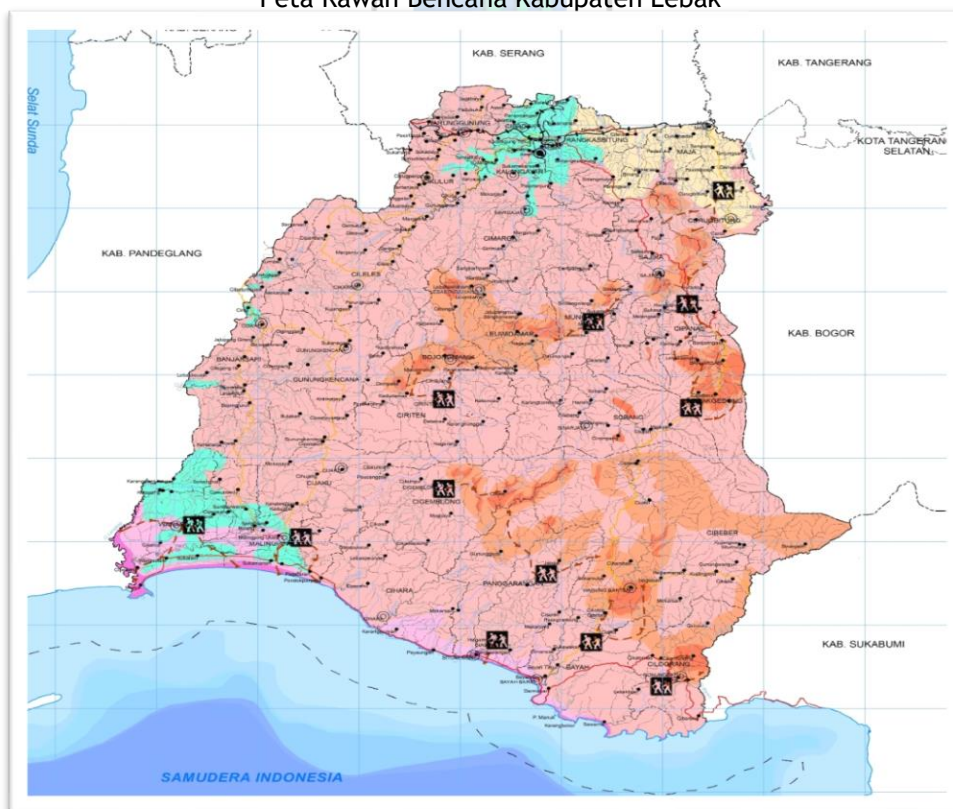
Rawan Bencana Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Rawan Bencana				Total
		Daerah	Rawan	Rawan	Rawan	
1.	Banjarsari	3.126,51	12.023,09	805,90		15.955,50
2.	Bayah		13.004,72		1.372,49	14.377,21
3.	Bojongmanik	6.874,68	2.717,16			9.591,83
4.	Cibadak	958,00		2.674,72		3.632,71
5.	Cibeber	1.444,67	38.651,74			40.096,41
6.	Cigemblong	5.806,94	9.497,99			15.304,93
7.	Cihara	3.861,49	6.102,64		2.505,72	12.469,86
8.	Cijaku	6.044,74	5.257,37	166,31		11.468,42
9.	Cikukur	5.852,11		330,87		6.182,97
10.	Cileles	14.197,27	1.141,49			15.338,76
11.	Cilograng		9.570,30		31,41	9.601,71

No	Kecamatan	Rawan Bencana				Total
		Daerah	Rawan	Rawan	Rawan	
12.	Cimarga	5.208,41	13.183,32	360,92		18.752,65
13.	Cipanas	3.609,16	2.916,14			6.525,30
14.	Cirinten	5.235,19	7.019,77			12.254,95
15.	Curugbitung	3.317,93	5.999,40			9.317,33
16.	Gunungkencana	11.189,12	2.612,38			13.801,50
17.	Kalanganyar	907,47	504,10	1.447,78		2.859,34
18.	Lebakgedong	122,86	9.037,11			9.159,98
19.	Leuwidamar	7.301,23	7.003,86			14.305,09
20.	Maja	5.951,07	1.862,60	3,46		7.817,14
21.	Malingping	42,41	4.521,89	3.089,22	2.547,95	10.201,47
22.	Muncang	2.711,83	5.983,54			8.695,38
23.	Panggarangan		16.663,91		1.051,61	17.715,51
24.	Rangkasbitung	2.573,16	1.497,29	3.239,25		7.309,70
25.	Sajira	4.228,34	6.238,29			10.466,64
26.	Sobang	1.533,06	9.616,28			11.149,34
27.	Wanasalam		156,93	6.590,98	4.671,10	11.419,02
28.	Warunggunung	4.667,18		69,35		4.736,53
	Jumlah	106.764,83	192.783,31	18.778,74	12.180,28	330.507,16

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Gambar 2.6
Peta Rawan Bencana Kabupaten Lebak

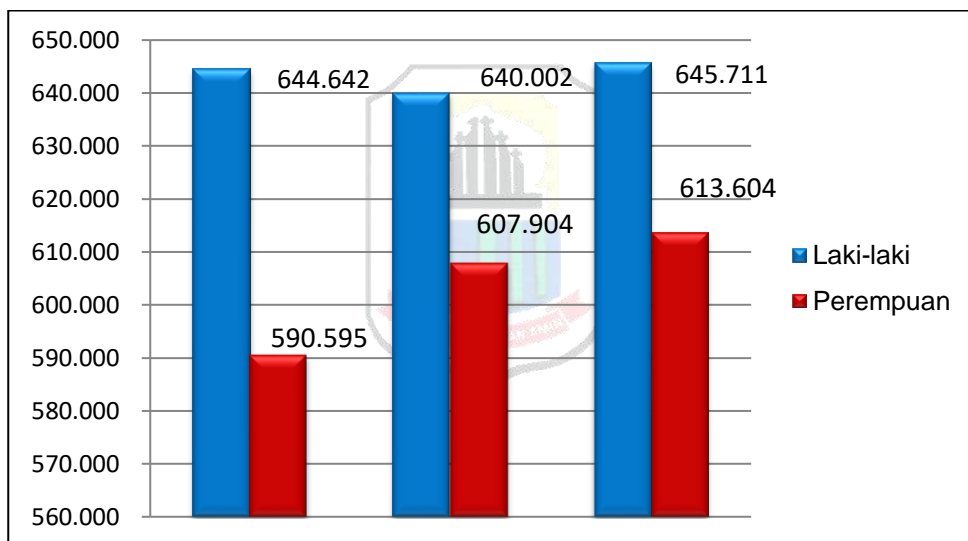


Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

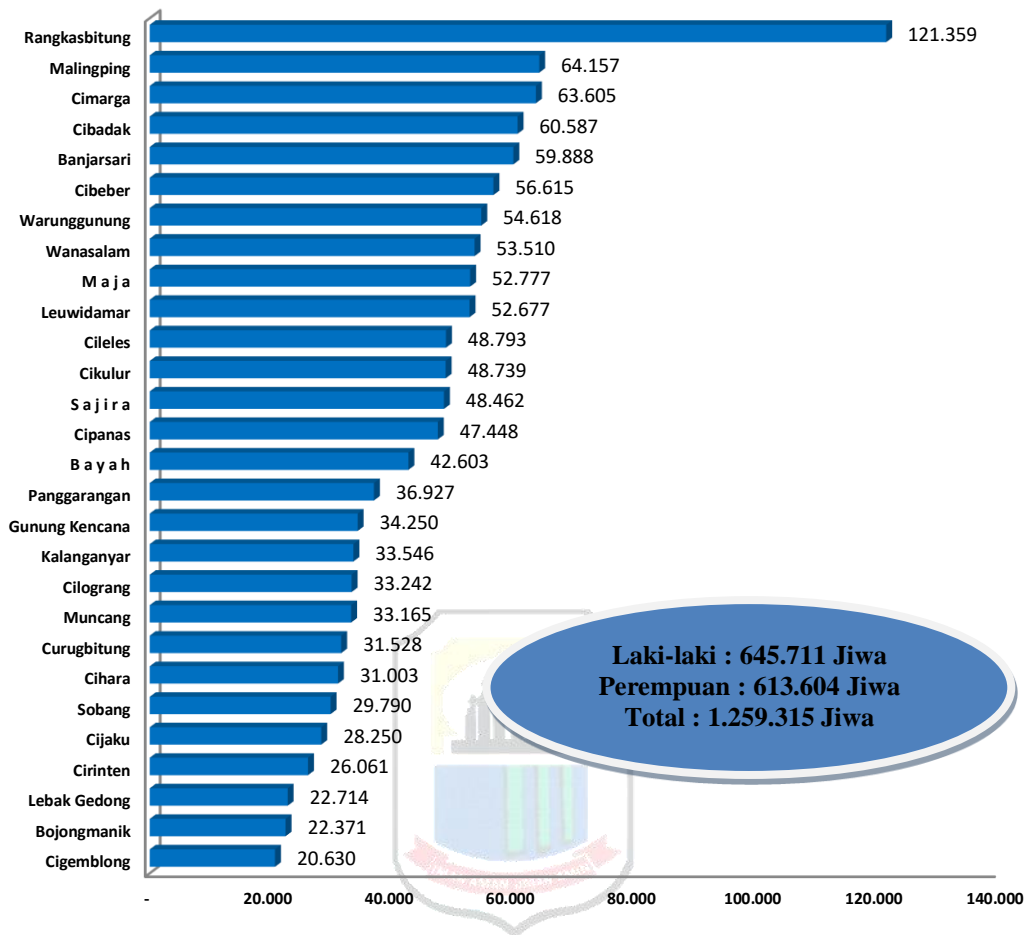
2.1.1.2 Demografi

Secara demografis, berdasarkan hasil pendataan Penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, jumlah penduduk Kabupaten Lebak pada tahun 2012 mencapai 1.235.237 jiwa. Angka ini bertambah menjadi 1.247.906 pada tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2014 terus mengalami peningkatan menjadi 1.259.315 jiwa. Berikut ini digambarkan perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Lebak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, sejak tahun 2012-2014 serta sebaran penduduk berdasarkan kecamatan pada tahun 2014 sebagai berikut.

Grafik 2.3
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak
Tahun 2012 - 2014



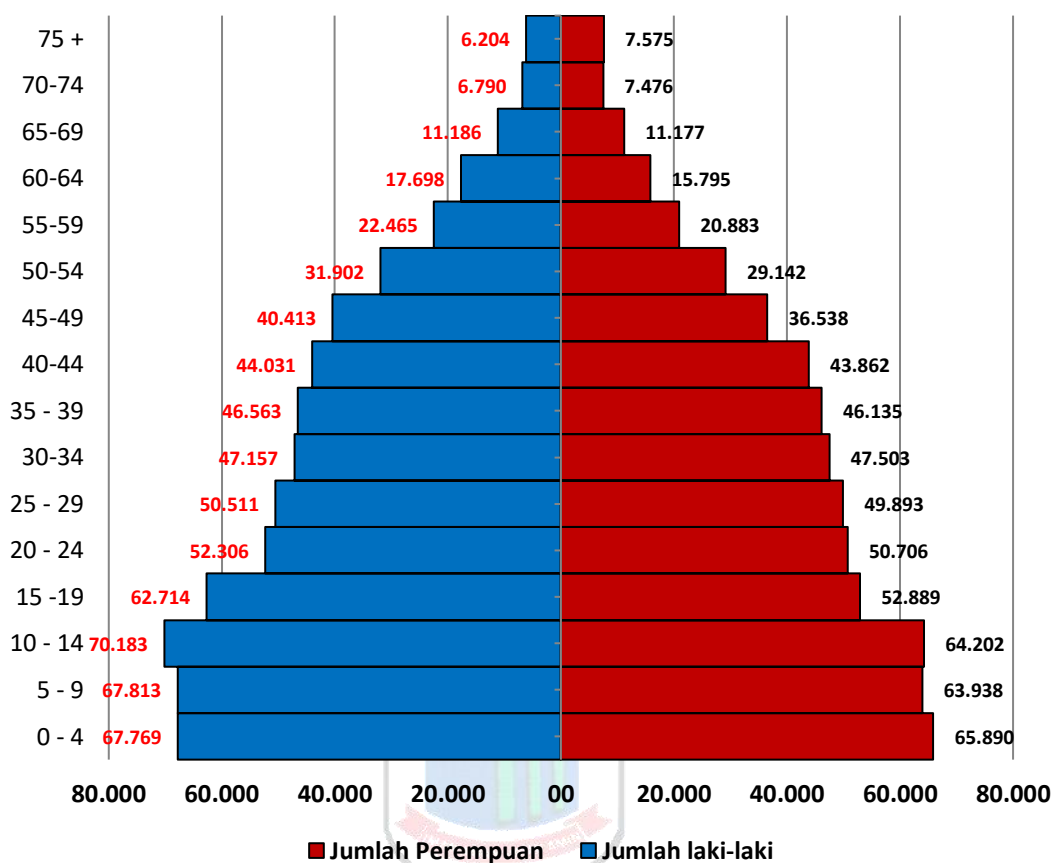
Grafik 2.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2014



Sementara bila dilihat dari struktur usianya, penduduk Kabupaten Lebak didominasi oleh penduduk usia produktif yakni usia 15 - 64 tahun. Gambaran lengkap tentang hal ini dapat dilihat dari piramida penduduk sebagai berikut:

Grafik 2.5

Piramida Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2014



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2015

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

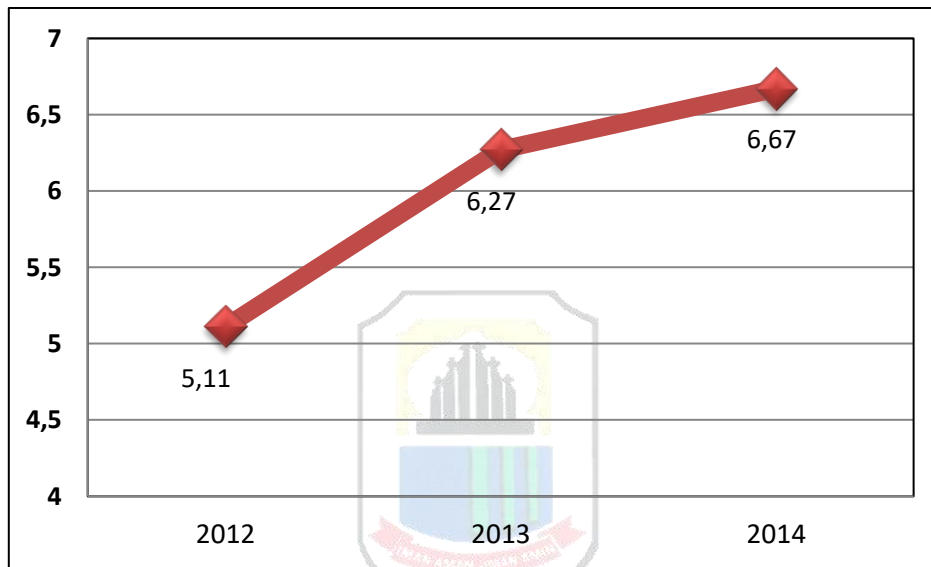
Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari tiga fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial dan fokus seni budaya dan olah raga. Masing-masing fokus tersebut dibahas pada bagian di bawah ini:

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur secara makro dari beberapa indikator makro ekonomi, antara lain: capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), PDRB per kapita, Laju Inflasi, dan Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi merepresentasi kenaikan kapasitas produksi suatu daerah dari tahun ke tahun, yang diperoleh dari hasil perbandingan pertambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya. Sedangkan PDRB itu sendiri merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah pada tahun tertentu atau periode tertentu.

Grafik 2.6
Perkembangan LPE Kabupaten Lebak
Tahun 2012 - 2014



Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2015

Grafik di atas, menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Lebak selama periode tahun 2012-2014. LPE Kabupaten Lebak dari tahun 2012 - 2014 secara bertahap mengalami peningkatan. Beberapa sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai total PDRB yaitu sektor pertanian yang kontribusinya rata-rata mencapai 25,62%, disusul oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan kontribusi sebesar 13,93% serta sektor industry pengolahan 11,66%. Gambaran mengenai kontribusi sektoral terhadap nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2012-2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Distribusi PDRB Kabupaten Lebak Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2012-2014

KATEGORI	2012	2013	2014
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,61	27,20	25,62
B. Pertambangan dan Penggalian	8,28	7,41	7,50
C. Industri Pengolahan	12,23	12,26	11,66
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,07
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06
F. Konstruksi	4,83	5,00	5,82
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,98	14,12	13,93
H. Transportasi dan Pergudangan	6,06	6,11	6,30
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,58	4,54	4,77
J. Informasi dan Komunikasi	0,72	0,74	0,83
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,64	1,70	1,70
L. Real Estate	7,00	7,06	7,15
M,N. Jasa Perusahaan	0,32	0,31	0,32
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,85	4,63	5,14
P. Jasa Pendidikan	5,39	5,37	5,52
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,01	1,01	1,03
R,S,T,U. Jasa lainnya	2,37	2,42	2,59
Jumlah	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Lebak, 2014

Masih dominannya kontribusi sektor pertanian adalah konsekuensi logis dari karakteristik wilayah Kabupaten Lebak yang berciri agraris. Ketersediaan lahan pertanian dan dukungan tenaga kerja yang cukup berlimpah di sektor ini membuat nilai tambah produk-produk pertanian dominan dalam mempengaruhi pembentukan PDRB Kabupaten Lebak, meski sesungguhnya kapasitas untuk meningkatkan nilai tambah di sektor ini masih relatif kecil bila dibandingkan dengan sektor lainnya.

Secara makro, ekonomi Kabupaten Lebak terus bertumbuh dalam lima tahun terakhir, dan pertumbuhan ini akan terus berlanjut mengingat kecenderungan perekonomian Kabupaten Lebak yang diperkirakan tidak lagi bergantung pada sektor primer karena berkembangnya sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa. Iklim usaha yang kian kondusif diyakini akan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor riil di masyarakat sehingga mampu meningkatkan nilai total PDRB di masa depan. Gambaran tentang perkembangan PDRB Kabupaten Lebak dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.9
Perkembangan PDRB Kabupaten Lebak ADHK Tahun 2012-2014
(Dalam Jutaan Rupiah)

KATEGORI	2012	2013 *)	2014 **)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.726.739,54	4.048.602,85	4.067.291,19
B. Pertambangan dan Penggalian	1.159.775,02	1.102.410,65	1.190.312,18
C. Industri Pengolahan	1.713.323,42	1.825.563,99	1.851.732,81
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8.148,43	8.991,04	10.497,17
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.097,21	9.101,39	9.871,58
F. Konstruksi	677.017,39	744.666,34	924.617,91
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.957.614,19	2.101.171,88	2.212.200,10
H. Transportasi dan Pergudangan	848.694,16	910.138,72	1.000.631,30
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	641.385,98	675.197,19	756.811,90
J. Informasi dan Komunikasi	100.975,08	110.460,12	131.108,44
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	229.959,95	252.302,65	269.506,85
L. Real Estate	980.877,73	1.051.564,96	1.134.664,57
M,N. Jasa Perusahaan	44.392,64	46.622,11	50.859,18
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	678.782,39	688.601,32	816.828,53
P. Jasa Pendidikan	755.103,03	799.623,20	876.156,75
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	142.076,28	149.679,18	162.827,47
R,S,T,U. Jasa lainnya	332.246,49	359.904,72	412.029,72
PDRB	14.006.208,92	14.884.602,32	15.877.947,64

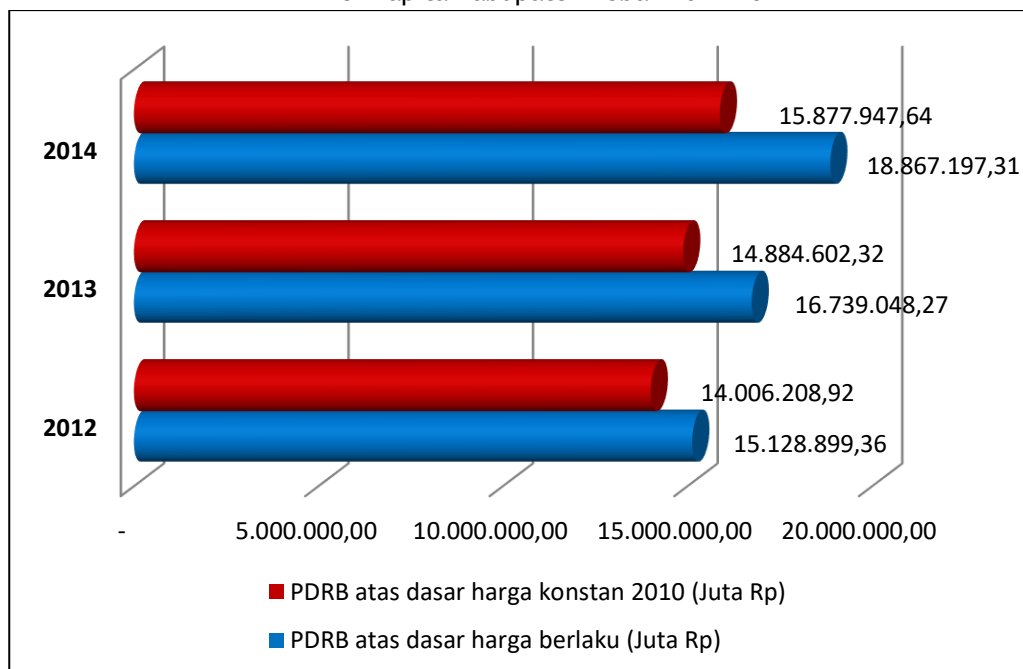
Sumber : BPS Kab. Lebak

*) Angka Perbaikan

***) Angka Sementara

Kecenderungan meningkatnya kesejahteraan rakyat juga tercermin dari peningkatan nilai PDRB per kapita baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini.

Grafik 2.7
PDRB Per Kapita Kabupaten Lebak 2012-2014



Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2014

*) Angka Sementara

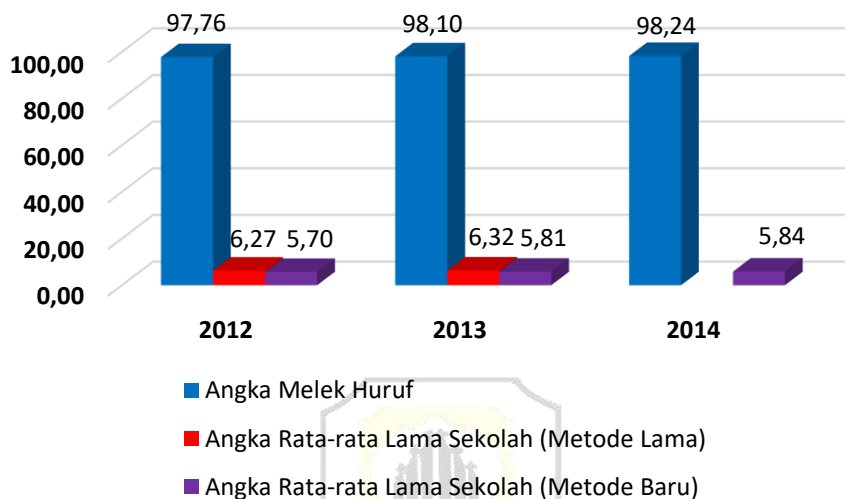
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan Sosial

Implikasi dari makin meningkatnya kinerja perekonomian daerah adalah meningkatnya kesejahteraan sosial, yang tercermin pada sejumlah indikator makro pembangunan manusia, antara lain: Angka Melek Huruf (AMH), Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), angka kelangsungan hidup bayi, Angka Usia Harapan Hidup (AHH), persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja, dan lain-lain.

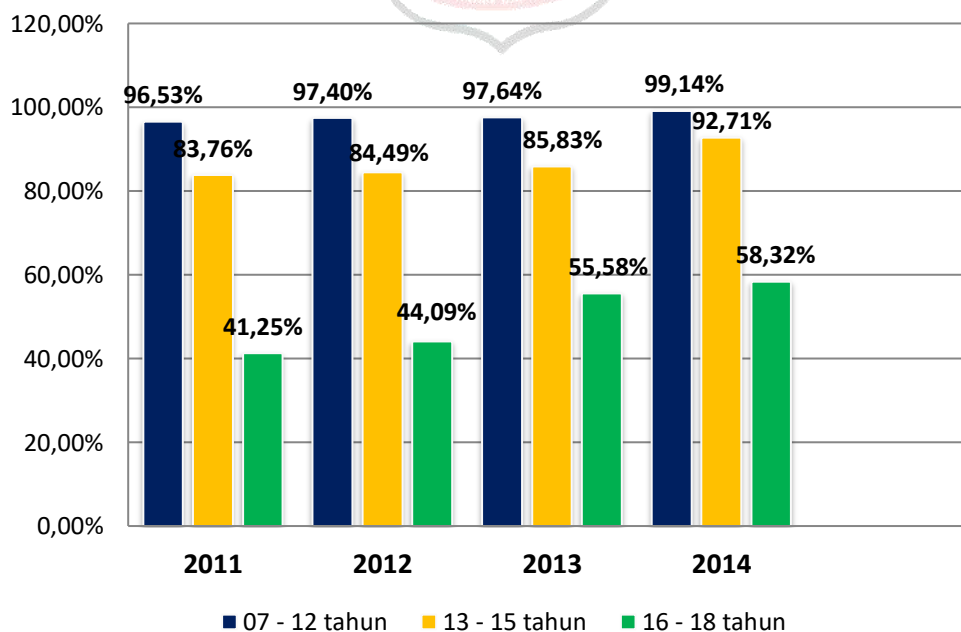
Angka Melek Huruf menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (latin atau huruf lainnya). Data pada dinas terkait menunjukkan peningkatan AMH dari tahun ke tahun. Tercatat AMH pada akhir tahun 2012 telah mencapai 97,76%, meningkat cukup memadai menjadi 98,24% pada tahun 2014. Demikian pula dengan Rata-rata Lama Sekolah yang dari waktu ke waktu juga mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, dimana pada akhir tahun 2012 RLS di Kabupaten Lebak telah naik menjadi 6,27 tahun menjadi 6,32 pada tahun 2013. Sedangkan melalui penghitungan metode baru, dimana penghitungan rata-rata lama sekolah dihitung

mulai dari usia 25 tahun keatas, maka RLS yang diperoleh pada tahun 2012 sebesar 5,70 menjadi 5,84 . Grafik berikut mendeskripsikan capaian AMH, RLS, APS di Kabupaten Lebak pada kurun waktu 2012-2014.

Grafik 2.8
Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Lebak Tahun 2012 - 2014

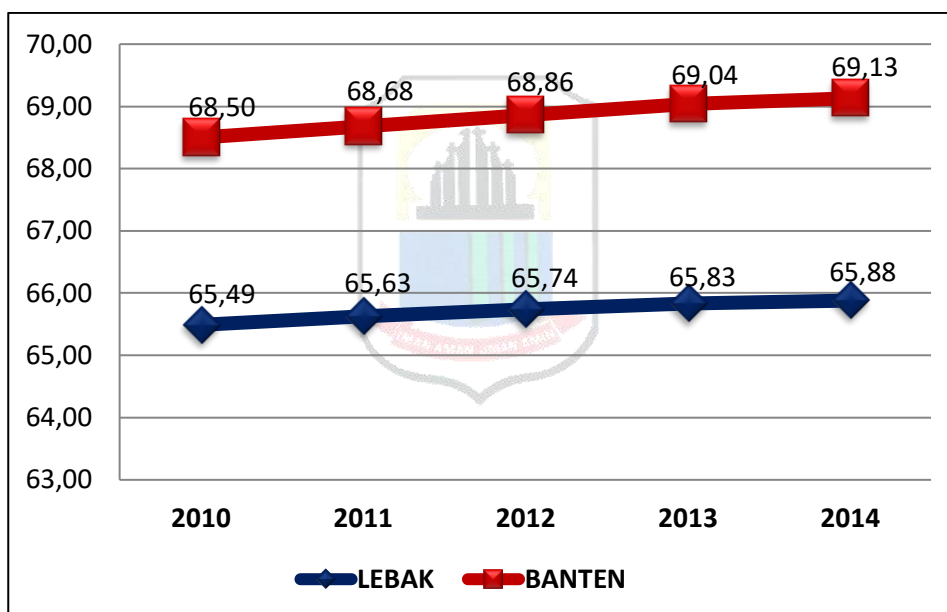


Grafik 2.9
Perkembangan angka partisipasi sekolah (aps) kabupaten lebak tahun 2011 - 2014



Di samping aspek pendidikan, kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari indikator pembangunan manusia lainnya, yaitu Usia Harapan Hidup yang merepresentasi derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode waktu tertentu, diukur melalui Usia Harapan Hidup (UHH) waktu lahir. Pada tahun 2010, UHH Kabupaten Lebak mencapai angka 65,49 tahun, tahun 2011 menjadi 65,63 tahun, pada tahun 2012 menjadi 65,74 tahun, sedangkan di tahun 2013 naik menjadi 65,83 tahun, dan pada tahun 2014 sebesar 65,88 tahun. Gambaran tentang kemajuan UHH di Kabupaten Lebak dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.10
Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH)
Kabupaten Lebak 2010-2014



Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2012

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan.

Untuk memwadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan oleh pemerintah, maupun atas inisiasi masyarakat seperti melalui berbagai

organisasi kepemudaan. Sementara itu untuk mendukung aktivitas olahraga masyarakat, Pemerintah Daerah telah menyediakan berbagai sarana olahraga, diantaranya kawasan *Sport Center*, kawasan alun-alun Rangkasbitung dan GOR Karta Natanegara. Pemerintah Kabupaten Lebak juga terus melakukan pembinaan terhadap organisasi/klub olahraga sebanyak 32 cabang induk olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Fungsi pemerintah sebagai dinamisator pembangunan, maka bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan kondisi eksisting daerah Kabupaten Lebak, baik pada urusan wajib maupun urusan pilihan.

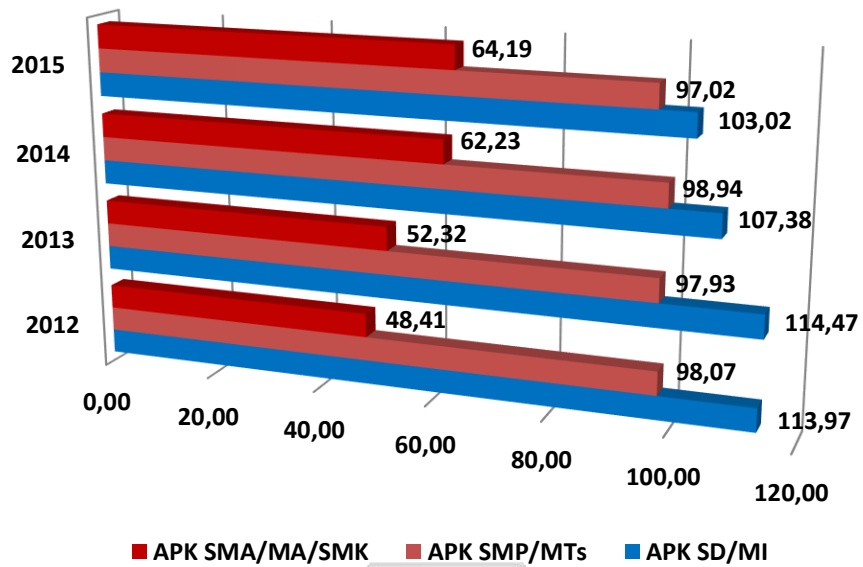
a. Fokus Layanan Urusan Wajib

1). Pendidikan

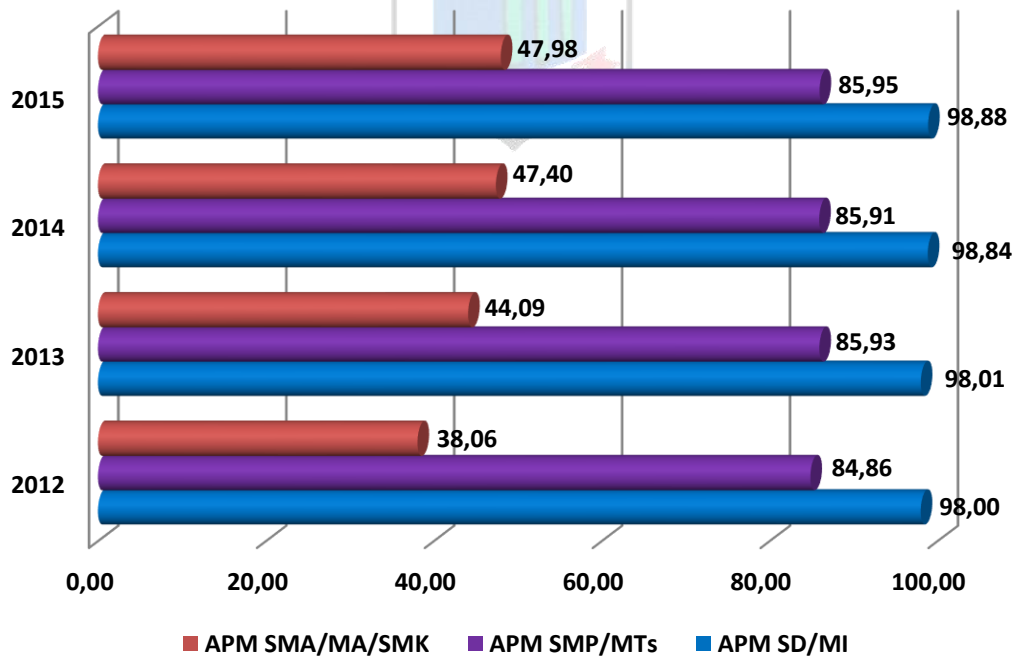
Pendidikan dasar dan menengah merupakan salah satu pelayanan publik yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Upaya untuk memperluas cakupan layanan pendidikan dasar dan menengah ini dilakukan tidak hanya melalui program pendidikan formal namun juga melalui program pendidikan non formal melalui penyelenggaraan Program Paket A, B dan C. Di samping itu, penyelenggaraan Taman Baca Masyarakat, penyelenggaraan keaksaraan fungsional, serta kelompok belajar masyarakat juga dilakukan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat dan mengeradikasi buta huruf di kalangan masyarakat. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) dari semua jenjang pendidikan merupakan indikator yang lazim digunakan guna mengukur efektivitas cakupan layanan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yang diukur berdasarkan tiap-tiap jenjang pendidikan.

Kebijakan yang terarah dan efektif dalam kurun waktu lima tahun terakhir berdampak cukup nyata pada meningkatnya APK dan APM di seluruh jenjang pendidikan, meski sejumlah kendala menyebabkan optimalitasnya masih harus ditingkatkan di masa depan. Gambaran tentang perkembangan APK dan APM pada jenjang SD dan sederajat sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.11
Perkembangan APK Tahun 2012-2015



Grafik 2.12
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
di Kabupaten Lebak Tahun 2012-2015



2) Kesehatan

Meski secara makro derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lebak telah terrepresentasi dari Usia Harapan Hidup waktu lahir (UHH) di atas, namun cakupan layanan bidang kesehatan pada level mezo indikator dapat dilihat pada Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Sepanjang tahun 2011-2015 AKI mengalami fluktuatif. Sedangkan AKB terus mengalami penurunan. Gambaran rinci AKI dan AKB di Kabupaten Lebak pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

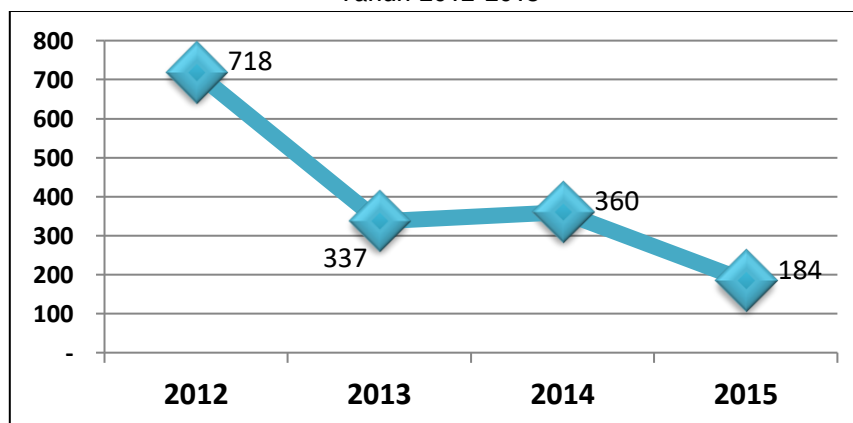
Tabel 2.10
Angka Kematian Ibu dan Bayi Di Kabupaten Lebak
Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013*	2014	2015
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	30,57	28,16	24,64	21,85	19,80
2	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	196,96	172,09	157,66	209,54	179,20

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, 2016

Selain AKB, indikator menggambarkan kecenderungan kemajuan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lebak, antara lain terus Jumlah anak penderita gizi buruk yang cenderung mengalami penurunan.

Grafik 2.13
Jumlah Balita Penderita Gizi Buruk di Kabupaten Lebak
Tahun 2012-2015



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, 2016

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan yaitu dengan meningkatkan kapasitas dan cakupan layanan kesehatan di Kabupaten Lebak sebagaimana tergambar dari meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan bagi masyarakat sebagaimana tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11
Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan Di Kabupaten Lebak
Tahun 2010-2015

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Puskesmas	40	41	41	41	42	42
2	Puskesmas DTP	14	14	14	14	14	18
2	Jumlah Poliklinik	77	90	101	73	101	139
3	Jumlah Pustu	73	72	70	71	68	68
4	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
5	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	0,06	0,07	0,08	0,06	0,07	0,07
6	Rasio Pustu persatuan penduduk	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
7	Cakupan Puskesmas	142,86	146,43	146,43	146,43	150,00	150,00
8	Cakupan Pustu	21,16	20,87	20,29	20,58	19,71	19,71
9	Jumlah Posyandu	1.853	1.956	1.974	1.938	1.929	1.949
10	Rasio Jumlah Posyandu Terhadap Jumlah Balita	18,21	17,42	18,05	20,75		
11	Jumlah Dokter	270	230	244	105	135	105
12	Rasio Jumlah Dokter Terhadap Jumlah Penduduk	0,19	0,19	0,19	0,09	0,12	0,09
13	Jumlah Tenaga Medis	1.929	2.199	2.324		1.091	1.153
14	Rasio Jumlah Tenaga Medis Terhadap Jumlah Penduduk	1,59	1,83	1,81		0,94	0,97

3) Lingkungan Hidup

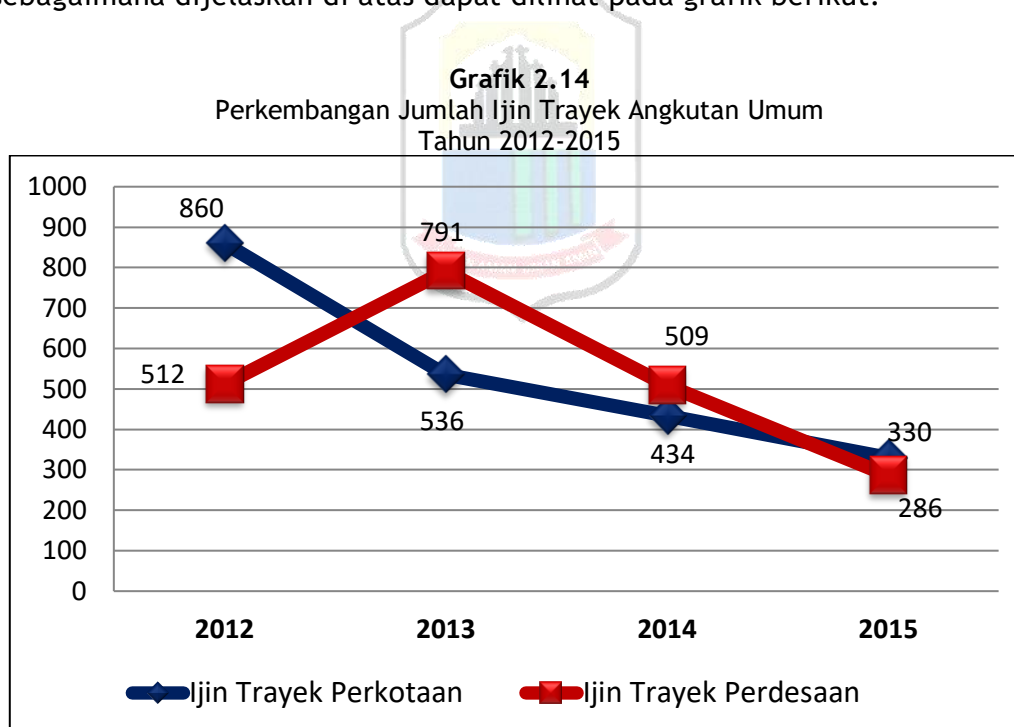
Prinsip pembangunan berkelanjutan mengandung tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Ketiga pilar tersebut senantiasa perlu ada keseimbangan antara satu dengan yang lainnya, namun dalam kenyataannya salah satu pilar yang sering kurang diperhatikan adalah masalah lingkungan hidup. Hal ini terbukti bahwa telah terjadi penurunan kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup baik secara lokal maupun global diantaranya terjadinya banjir, longsor, kekeringan, pemanasan global dan fenomena alam lainnya yang dirasakan akhir-akhir ini sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Untuk meningkatkan konservasi sumber daya alam dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup perlunya pengembangan pemanfaatan data dan informasi melalui program Menuju Indonesia Hijau (MIH) setiap tahunnya sebagai instrument untuk pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

4). Perhubungan

Sektor perhubungan memiliki peranan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karenanya cakupan layanan sektor perhubungan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun melalui pembangunan dan pemeliharaan terminal angkutan umum dan pelayanan ijin trayek angkutan umum.

Sejak tahun 2012-2015, jumlah ijin trayek angkutan umum tercatat mengalami penurunan. Gambaran fluktuasi perijinan trayek angkutan sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak, 2016

Di samping itu, jumlah terminal di Kabupaten Lebak dari tahun tercatat sebanyak 6 terminal, terdiri dari: 1 terminal tipe B berada di Kecamatan Cibadak dan 5 terminal tipe C berada di Kecamatan Rangkasbitung, Kalanganyar, Malingping, Bayah dan Wanasalam.

5). Perumahan

Selama kurun waktu 2008 - 2013, penanganan perumahan difokuskan pada upaya untuk membantu penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan kualitas lingkungan perumahan oleh masyarakat, serta pengembangan kawasan permukiman baru yang lebih tertata.

Selama kurun waktu tersebut telah dilakukan fasilitasi pembangunan rumah swadaya dan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 6794 unit rumah.

Namun demikian, percepatan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu segera dilakukan dengan melibatkan masyarakat serta dunia usaha dalam pengembangan perumahan di Kabupaten Lebak perlu terus ditingkatkan. Di samping itu, implementasi pengembangan kasiba/lisiba di daerah masih cukup rendah sehingga upaya-upaya untuk mendorong percepatan pengembangan kasiba/lisiba sangat diperlukan.

6). Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang dilaksanakan bersama-sama antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seperti yang diamanatkan dalam undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari luas wilayah kota yang meliputi 20 % ruang terbuka hijau publik dan 10 % ruang terbuka hijau privat, di wilayah perkotaan Ibu Kota Kabupaten Lebak untuk proporsi ruang terbuka hijau sebesar 43,62 %, terdiri dari RTH publik sebesar 34,17% dan RTH privat sebesar 9,44%.

Dari kondisi ini dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka hijau publik di Wilayah perkotaan Ibu Kota Kabupaten Lebak sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait walaupun sebaran dan penataanya perlu dijaga sesuai dengan rencana tata ruang, untuk RTH privat perlu sosialisasi dan menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan RTH yang sudah ada di masing-masing pekarangan rumah tinggal, kantor, pertokoan maupun tempat usaha.

7). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Membangun masyarakat dan desa salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan kepada upaya dan fasilitasi serta pemberdayaan masyarakat khususnya bagi keluarga Pra Sejahtera melalui peningkatan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan, penguatan peran serta lembaga kemasyarakatan, dan pemerintahan desa.

Kinerja Pembangunan aspek pemerintahan dan pembangunan desa, menunjukkan bahwa pada tahun 2008 telah dibentuk dan ditetapkan 25 desa baru sebagai desa pemekaran, sehingga pada tahun 2009 wilayah kabupaten lebak terbagi atas 28 kecamatan dan 340 desa dan 5 kelurahan. Dalam rangka menunjang kinerja dan pelayanan kepada masyarakat maka pada tahun 2009 telah dilaksanakan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa melalui diklat yang diikuti seluruh kepala desa.

Gerakan PKK yang merupakan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keluarga. Jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Lebak sebanyak 28.

Pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa juga dapat ditinjau dari jumlah organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berjumlah 51 LSM dan Organisasi Masyarakat sebanyak 87 pada tahun 2011. Tingginya animo masyarakat untuk membentuk organisasi kemasyarakatan menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

8). Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Pelayanan terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat melalui penyediaan polisi pamong praja, linmas dan pos siskamling. Jumlah anggota satuan linmas pada tahun 2010 sebanyak 3.937 org, sedangkan pada tahun 2011 adalah 4.609 org atau meningkat sebanyak 672 org.

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat selama periode 2007-2009 difokuskan pada

terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing dan terwujudnya perlindungan masyarakat dari bencana. Pelanggaran peraturan daerah oleh masyarakat terus mengalami fluktuasi, yaitu dari 41 kasus pengaduan pelanggaran pada tahun 2007 menjadi 78 kasus pada tahun 2008, dan 42 kasus pada tahun 2009. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan perda masih kurang, hal ini disebabkan belum efektifnya sosialisasi peraturan daerah, sejak proses legislasi, sosialisasi hingga penerapannya.

Capaian kinerja Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat selama periode 2007-2009 adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan jumlah anggota perlindungan masyarakat (Linmas);
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat mentaati peraturan daerah;
3. Terkendalinya dan terdeteksinya secara dini gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
4. Terdapatnya informasi/data obyektif mengenai prediksi gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat pada akhir 2008, serta langkah-langkah penanggulangannya.

Dalam rangka menciptakan dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan, fungsi pengawasan dan mekanisme kontrol dilaksanakan oleh lembaga penegak perda terutama Satuan Polisi Pamong Praja yang disiagakan di kabupaten dan kecamatan.

9). Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Lembaga Keuangan

Di Kabupaten Lebak terdapat 811 unit koperasi dan yang aktif sebanyak 709 unit pada tahun 2015. Kegiatan industri yang dikelola oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu CV, Firma, PT/NV, PO Berijin dan PO tidak berijin pada tahun 2010 sebanyak 14.813 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 97.703 jiwa. Pada tahun 2011 menjadi 14.999 perusahaan atau meningkat sebanyak 186. Sementara sektor industri menengah kenaikannya hanya satu, yaitu dari 20 pada tahun 2010 menjadi 21 perusahaan pada tahun 2011.

Tabel.2.12
 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Lebak
 Tahun 2010-2015

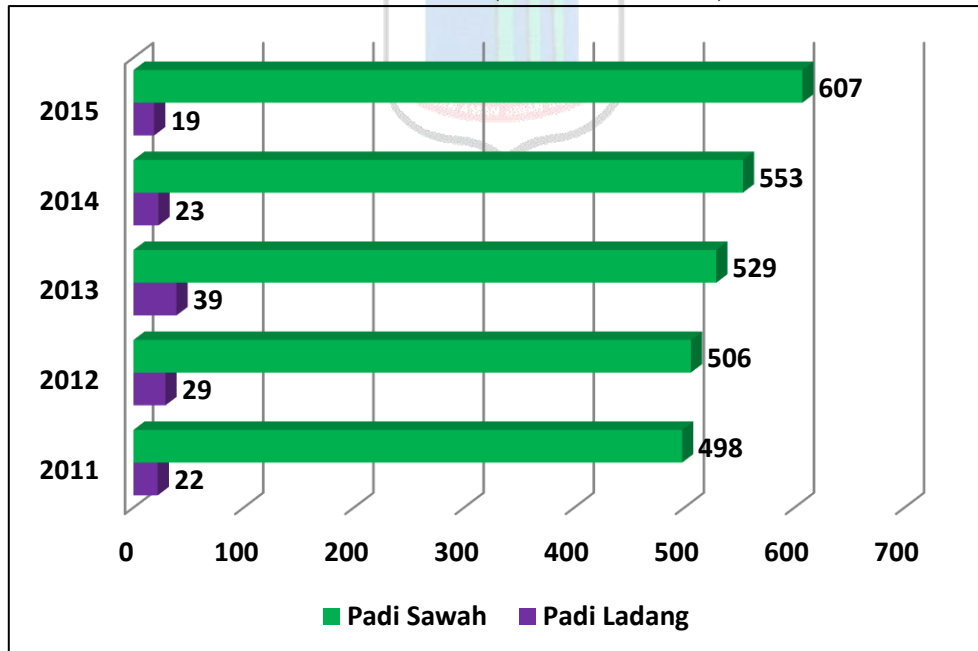
No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Koperasi Aktif	618	645	657	671	689	709
2.	Jumlah Koperasi	726	753	769	779	791	811
3.	Persentase Koperasi Aktif	85,12	85,66	85,44	86,14	87,10	87,42

b. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1). Pertanian

Sebagai daerah penyangga pangan Provinsi Banten, produksi padi di Kabupaten Lebak merupakan komoditas unggulan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Produksi padi cenderung meningkat setiap tahunnya yang rata-rata mencapai 5% pada kurun waktu tahun 2011-2015, dari 520 ton pada tahun 2011 menjadi 626 ton pada tahun 2015 sebagaimana dapat dilihat secara detail pada grafik berikut ini.

Grafik 2.15
 Produksi Padi di Kabupaten Lebak
 Tahun 2011-2015 (Dalam Ribuan Ton)



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, 2016

*) Angka Perkiraan

Di samping padi, Kabupaten Lebak juga menghasilkan komoditas unggulan tanaman pangan lainnya seperti: jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Ubi kayu merupakan komoditas yang sangat potensial, demikian pula ubi jalar, kedelai, serta aneka buah-buahan seperti: pisang, manggis, durian dan rambutan.

2) Peternakan

Berdasarkan total produksinya pada tahun 2012-2015, daging ayam ras adalah komoditas unggulan di sektor peternakan, diikuti daging ayam buras, kerbau dan sapi potong. Grafik berikut menggambarkan produksi komoditas sektor peternakan pada tahun 2012-2015 yang terdata di dinas terkait.

Tabel 2.13
Perkembangan Produksi Daging di Kabupaten Lebak
Tahun 2012-2015 (Dalam Ribuan Ton)

No	Komoditas	2012	2013	2014	2015	
					Daging	Jumlah Ternak Yang Dipotong (Ekor)
1	Sapi	125.518	126.814	219.454	618.755	2.517
2	Kerbau	894.620	1.031.109	879.591	985.045	4.454
3	Kambing	172.001	172.424	183.936	275.028	23.054
4	Domba	113.781	130.476	141.707	353.846	21.087
5	Ayam Buras	1.660.979	1.574.868	1.571.245	709.703	466.910
6	Ayam Ras Pedaging	4.489.388	4.372.182	5.051.432	5.103.707	4.288.830
7	Ayam Ras Petelur	74.942	74.942	74.854	65.766	45.671
8	Itik	22.994	20.876	20.922	48.900	29.817
9	Itik Manila/Entog	70.775	38.793	38.889	53.771	48.883
Total		7.624.998	7.542.484	8.182.030	8.214.521	4.931.223

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Lebak, 2016

3). Kehutanan

Produksi kayu Kabupaten Lebak menunjukkan tingkat produksi yang dinamis. Diantara jenis kayu yang ada, produksi tertinggi pada kayu sengon. Tingkat produksi yang tinggi tersebut disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan lahan yang tersedia. selain kayu dalam bidang kehutanan juga menghasilkan Madu Lebah dan Jamur.

4). Perkebunan

Dari sekitar 15 jenis komoditas perkebunan yang diusahakan, enamkomoditas diantaranya menjadi unggulan Kabupaten Lebak yaitu, Kelapa Dalam, Karet, Kakao, Aren Cengkeh, Kopi Robusta. Data tahun 2012 menunjukkan bahwa produksi tertinggi dari ke 6 jenis komoditas tersebut adalah Kelapa Dalam yakni sebanyak 12.906 Ton, berikutnya adalah kelapa sawit sebanyak 5.770 Ton. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut ini:

Tabel 2.14
Data Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Hasil Perkebunan
Kabupaten Lebak Tahun 2015

No	Komoditi	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Harga (Rp.)	Wujud Produksi
1	Karet	14.838,67	5.100,50	752,06	4.000	lump
2	Kelapa	21.298,00	12.906,55	832,68	7.500	Kopra
3	Kakao	3.500,05	1.766,50	1.135,39	29.000	Biji Kering
4	Kelapa	270,95	295,56	2.688,10	7.500	Kopra
5	Kelapa	3.802,00	5.770,00	2.165,10	1.500	Tbs
6	Cengkeh	6.169,95	2.905,00	605,21	115.000	Bunga
7	Aren	2.759,00	1.780,00	1.138,11	18.000	Gula Aren
8	Lada	333,57	27,00	147,72	140.000	Lada
9	Pandan	367,32	345,50	1.545,86	5.000	Daun
10	Panili	28,40	2,00	156,25	300.000	Biji kering
11	Jambu	1,95	1,50	882,35	-	Gelondong
12	Teh	31,50	20,32	1.161,14	-	Daun
13	Jarak	152,00	80,00	919,59	-	Biji Kering
14	Kapok	114,55	30,00	298,49	-	Serat
15	Kopi	1.658,50	580,00	400,66	18.500	Biji Kering
JUMLAH		55.326,41	31.610,44		190.600,00	

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2016

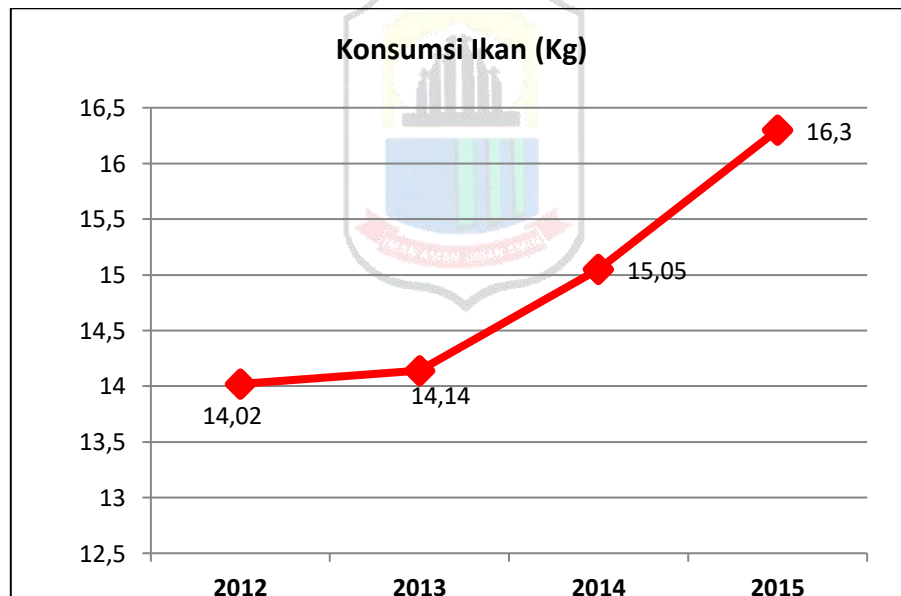
5) Kelautan dan Perikanan

Produksi ikan di Kabupaten Lebak pada tahun 2015 tercatat sebanyak 8.950.010 kg. Jumlah ini meningkat setiap tahunnya. Adapun jumlah konsumsi ikan pada tahun 2015 mencapai 16,3kg/perkapita/tahun. Jumlah ini meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Lebak. Gambaran produksi ikan dan konsumsi ikan per kapita terlihat pada Tabel 2.15 berikut.

Tabel 2.15
Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Lebak Tahun 2012-2015

NO	JENIS USAHA	2012	2013	2014	2015
I	BUDIDAYA IKAN				
1	Ikan Kolam	2.885.200	2.934.700	2.951.460	2.940.800
2	Ikan Sawah	26.020	7.200	6.800	7.100
3	Ikan Keramba	55.000	56.700	57.200	57.300
4	Ikan Kolam Air Deras	39.800	13.500	2.040	1.400
5	Ikan Jaring Apung	503.000	502.900	506.600	525.400
6	Ikan Tambak	17.700	20.400	20.600	20.600
JUMLAH I		3.526.720	3.535.400	3.544.700	3.552.600
II	PENANGKAPAN IKAN				
1	Penangkapan Ikan Laut	4.616.027	4.734.256	4.968.048	5.373.780
2	Perairan Umum	5.610	1.054	1.370	23.630
JUMLAH II		4.621.637	4.735.310	4.969.418	5.397.410
JUMLAH TOTAL		8.148.357	8.270.710	8.514.118	8.950.010

Grafik 2.16
Konsumsi Ikan Perkapita Kabupaten Lebak
Tahun 2012-2015



Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Lebak, 2016

6). Perdagangan dan Perindustrian

Di sektor perdagangan dan perindustrian, perkembangan sarana perdagangan terutama pasar menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015, jumlah pasar sebanyak 26 unit.

Di Kabupaten Lebak, industri umumnya berskala kecil. Pada tahun 2013, terdapat 15.298 unit industri kecil dan 24 unit industri menengah, dan semakin meningkat pada tahun 2015 menjadi 15.769 unit industri kecil. Dan 30 unit industri menengah.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kabupaten Lebak merupakan sentra penghasil gula aren dengan jenis produk gula semut dan cetak yang telah memiliki sertifikat makanan organik internasional sehingga dapat menembus pasar Belanda, Italia, dan sejumlah negara Eropa lainnya. Kelebihan gula aren Lebak, selain organik yang menyehatkan juga cocok dijadikan pemanis berbagai jenis bahan makanan dan minuman. Produksi gula aren yang diekspor ke pasar mancanegara diperkirakan mencapai 50-70 ton per bulan, yang dikumpulkan dari Kecamatan Sobang, Panggarangan, Cigemblong, Cihara, Cibeber, dan Muncang.

Di sektor pertambangan, Kabupaten Lebak juga potensial dalam menghasilkan beragam produksi bahan-bahan tambang antara lain: emas, Fosfat, Obsidian, Tras, Batu Gamping, Batu Pasir Kuarsa, Opal, Kaolin, Zeolith, Batu Besi, Timah Hitam, Feldspar, Batu Apung, Lempung, Bentonit Ca, Batu Gunung (Andesit- Basalt), Perak, dan Fosil Kayu. Berlimpahnya bahan baku semen (batu gamping, tanah liat, dan batu kapur) di Kecamatan Bayah, Cilograng, Panggarangan, Bojongmanik dan Muncang, memosisikan Lebak menjadi daerah yang menjanjikan bagi masuknya investor pabrik semen di masa depan. Industri batu sempur atau fosil kayu (Silicified wood) bahkan telah menembus pasar di sejumlah negara Eropa, Asia, dan Amerika Serikat. Sementara Zeolith yang merupakan bahan campuran pakan ternak, perikanan, atau tambak udang, bahan penurun kadar Ph tanah, bahan pengendali limbah industri, penjernih air minum, penghilang kesadahan air, dan penghilang bau/warna, belum banyak dieksploitasi meski potensinya sangat berlimpah di Kecamatan Bayah, yang mencapai lebih dari 123 juta ton.

Kabupaten Lebak mewarisi sejumlah obyek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata spiritual. Dengan 13 obyek wisata marina, 27 wisata tirta, 16 obyek wisata sejarah, 1 suaka alam, serta 20 obyek wisata budaya dan lainnya, menjadikan pariwisata sangat potensial untuk dikembangkan di masa depan. Sebagai

contoh: wisata alam pantai di Kecamatan Malingping, Panggarangan, dan Bayah; wisata alam lainnya Lebak Gedong (arung jeram) dan pemandian air panas di Cipanas. Demikian pula dengan potensi wisata budaya yang menjadi ikon Kabupaten Lebak, yang dapat ditemui pada Masyarakat Adat Cisungsang dan Citorek, Masyarakat Adat Kanekes, serta situs purbakala Kosala atau Lebak Sangka Kosala di Desa Lebak Gedong yang merupakan peninggalan tradisi megalitik berbentuk bangunan punden berundak dan menhir di tiap undakannya yang berjumlah lima; dan situs megalitik Cibedug yang terletak di Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber.

Kerajinan mebel dan perkakas berbahan baku bambu juga memiliki potensi ekspor yang tinggi, sebagaimana telah berkembang di daerah Pasir Ona Rangkasbitung Timur yang telah berhasil membuka pasar ekspor di Eropa dan Amerika Serikat.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Infrastruktur wilayah memiliki kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi infrastruktur wilayah bahkan secara langsung menjadi daya tarik bagi investor dalam mengembangkan rencana bisnisnya di suatu daerah. Terkait dengan hal ini, infrastruktur wilayah dimaksud adalah mencakup beberapa bidang, yaitu: jalan dan jembatan, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah dalam konteks tata ruang bahkan tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah.

1) Jalan dan Jembatan

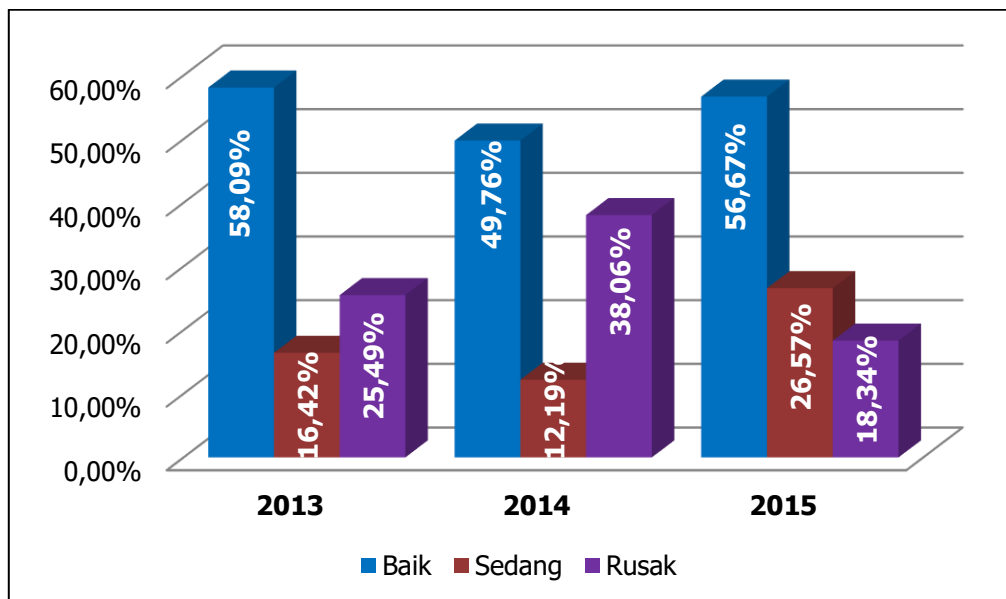
Dibandingkan dengan daerah sekitar, Lebak memiliki keunggulan kompetitif dalam hal kualitas infrastruktur jalan yang kondisinya relatif lebih baik. Dari sekitar 837,96 km jalan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Lebak 77,82% dalam kondisi baik dan hanya 22,18% saja yang dalam kondisi rusak, terdiri dari: rusak ringan sekitar 7,51%; rusak sedang sekitar 4,62%; dan rusak berat hanya sekitar 10,05% saja. Berikut adalah gambaran tentang kondisi jalan.

Tabel 2.16
Kondisi Jalan di Kabupaten Lebak
Tahun 2012

No	Kondisi	Panjang		Keterangan
1.	Total Jalan Kab/Kota	837.96	Km	Merupakan panjang jalan status kabupaten/kota berdasarkan SK Bupati/Walikota dilampirkan peta dan SK dimaksud
2.	Jumlah Jembatan Kabupaten	169.00	Unit	Merupakan jumlah dan panjang jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota
3.	Panjang Jembatan Kabupaten	2,349.20	Meter	
4.	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	652.06	Km	Merupakan total panjang jalan dalam kondisi baik. Kriteria baik sesuai dengan juknis DAK yaitu nilai kerusakan jalan $\leq 11\%$ (dilampirkan peta)
5.	Panjang Jalan dalam Kondisi Rusak Ringan	62.93	Km	Kriteria sedang sesuai dengan juknis DAK yaitu nilai kerusakan jalan $11 - < 16\%$
6.	Panjang Jalan dalam Kondisi Rusak Sedang	38.72	Km	Kriteria rusak sesuai dengan juknis DAK yaitu nilai kerusakan jalan $16 - < 23\%$
7.	Panjang Jalan dalam Kondisi Rusak Berat	84.25	Km	Kriteria rusak berat sesuai dengan juknis DAK yaitu nilai kerusakan jalan $\geq 23\%$
8.	Panjang Jalan Poros Desa	5,647.20	Km	Merupakan total panjang jalan poros desa berdasarkan SK Bupati/Walikota (dilampirkan peta dan data pendukung administrasinya/SK/Ketetapan lainnya)

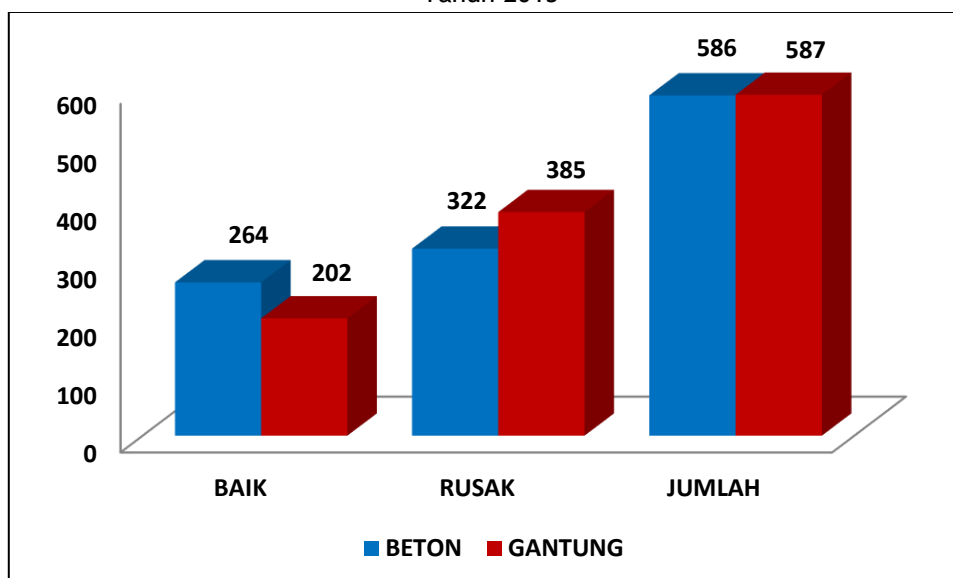
Sumber: Bappeda Kabupaten Lebak, 2012

Grafik 2.17
Kondisi Sarana Jalan di Kabupaten Lebak
Tahun 2013-2015



Pada infrastruktur jembatan, dimana dari sebanyak 586 unit jembatan beton, sebanyak 264 dalam kondisi baik dan 322 dalam kondisi rusak. Selanjutnya dari 587 jembatan gantung yang ada hanya 202 dalam kondisi baik, sedangkan sisanya dalam kondisi rusak.

Grafik 2.18
Kondisi Jembatan di Kabupaten Lebak
Tahun 2015



Sumber: Bappeda Kabupaten Lebak, 2016

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Dibandingkan kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Banten, Kabupaten Lebak termasuk pelopor dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif. Tercatat sejak tahun 2008, Kabupaten Lebak telah memiliki Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) yang berfungsi untuk mengendalikan sekaligus mempercepat proses perijinan yang sebelumnya berbelit-belit dan berbiaya mahal. Melalui KPPT tersebut sejumlah perijinan yang semula ditangani secara sporadis berdasarkan SKPD terkait telah disatukan di bawah satu atap. Selanjutnya untuk lebih meningkatkan pelayanan pada tahun 2013 KPPT bermetamorfosa menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPT). Dengan inovasi yang dilakukan inilah iklim investasi menjadi lebih baik, yang terbukti dengan meningkatnya realisasi investasi baik dari dalam maupun luar negeri di Kabupaten Lebak.

Tabel 2.17
Jumlah Investor Dan Jumlah Nilai Investasi
Berskala Nasional
Di Kabupaten Lebak Tahun 2013-2015

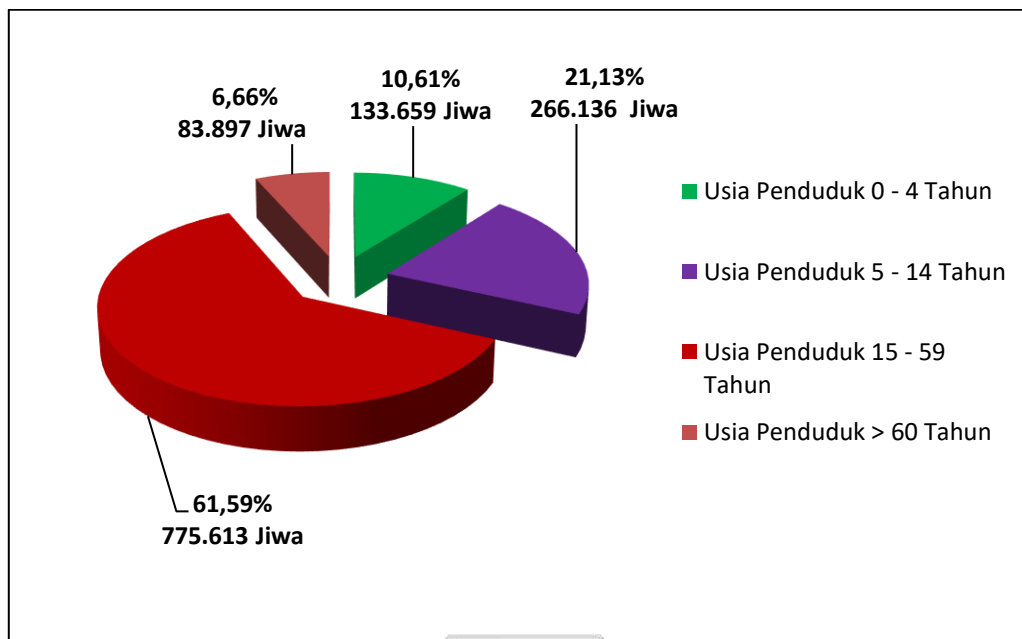
NO.	URAIAN	2013	2014	2015
1	NILAI INVESTASI			
1.1	NILAI INVESTASI PMA (US\$)	35.038.000	189.700.000	
1.2	NILAI INVESTASI PMDN (Rp. Ratusan Ribu)	3.819.346.487.840	268.005.488.000	1.252.489.000.000
2	JUMLAH INVESTOR			
2.1	PMA	6	4	2
2.2	PMDN	3	929	670

Sumber : BPMPT Kabupaten Lebak

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sebagai daerah yang sedang berkembang, sumber daya manusia di Kabupaten Lebak menjadi faktor pendorong bagi tumbuhnya geliat perekonomian daerah. Struktur usia penduduk yang sebagian besar terdiri dari penduduk usia produktif (61,59%) sebagaimana tampak pada grafik 2.20, adalah modal sosial yang sangat berperan penting bagi kemajuan daerah. Demikian pula dengan tingkat pendidikan masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya.

Grafik 2.19
Struktur Usia Penduduk Kabupaten Lebak
Tahun 2014



Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2016

Pada saat ini, peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan sangat terbuka. Hal ini ditopang oleh dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah melalui APBN-APBD yang akan berupaya menyediakan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen. Dalam kaitan ini, pemerintah menyadari bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia serta mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi satu bangsa. SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting bagi kemajuan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi kualitas SDM di wilayah tersebut. Peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau menciptakan peluang usaha lebih besar bagi mereka yang berpendidikan tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan APBD Tahun 2015 terhadap capaian 5 (lima) misi RPJMD diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2.18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah s.d 2015

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2014		2015		Realisasi Capaian RPJMD s.d 2015		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
	Misi 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia								
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								
1	Angka Melek Huruf	Persen	98.26	98.24	98.36	98.38	98.36	98.38	100.02
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6.30	6.30	6.34	6.34	6.34	6.34	100.00
3	Angka Partisipasi Kasar :								
	- PAUD	Persen	22.10	22.88	23.05	29.72	23.05	29.72	128.94
	- SLTP	Persen	98.93	98.94	99.14	97.02	99.14	97.02	97.86
	- SLTA	Persen	60.00	62.23	60.75	64.19	60.75	64.19	105.66
4	Angka Partisipasi Murni:								
	- SD	Persen	98.78	98.84	98.83	98.88	98.83	98.88	100.05
	- SLTP	Persen	85.80	85.91	85.85	85.02	85.85	85.02	99.03
	- SLTA	Persen	47.11	47.14	50.12	47.19	50.12	47.19	94.15

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2014		2015		Realisasi Capaian RPJMD s.d 2015		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
5	Angka Partisipasi Sekolah :								
	- SLTP	Persen	92.50	94.14	93.00	97.02	93.00	97.02	104.32
	- SLTA	Persen	46.25	47.24	47.25	64.19	47.25	64.19	135.85
6	Angka Putus Sekolah :								
	- SD	Persen	0.31	0.30	0.28	0.02	0.28	0.02	1,400.00
	- SLTP	Persen	0.30	0.13	0.25	0.09	0.25	0.09	277.78
	- SLTA	Persen	0.68	0.65	0.56	2.01	0.56	2.01	27.86
7	Angka Kelulusan :								
	- SD	Persen	96.13	97.40	96.63	98.31	96.63	98.31	101.74
	- SLTP	Persen	99.72	99.69	99.77	93.62	99.77	93.62	93.84
	- SLTA	Persen	98.67	99.29	98.70	93.66	98.70	93.66	94.89
8	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	94.49	98.40	94.56	95.73	94.56	95.73	101.24
9	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	86.75	85.74	87.05	62.11	87.05	62.11	71.35
10	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Orang	6,510	9,952	6,830	5,958	6,830.00	5,958.00	87.23
11	Jumlah event budaya	Event/Tahun	10	10	10	10	20.00	20.00	100.00
12	Cakupan pemeliharaan benda cagar budaya	Persen	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00
13	Angka Kematian Ibu	/ 100.000 KH	155.00	209.54	150.00	179.20	150.00	179.20	83.71

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2014		2015		Realisasi Capaian RPJMD s.d 2015		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
14	Angka Kematian Bayi	/ 1.000 KH	24.00	21.85	23.00	19.80	23.00	19.80	116.16
15	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	63.44	63.44	63.45	63.45	63.45	63.45	100.00
16	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Persen	0.63	0.19	0.61	0.30	0.61	0.30	203.33
17	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	83.75	68.68	88.75	85.28	88.75	85.28	96.09
18	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	80.00	67.83	85.00	68.41	85.00	68.41	80.48
19	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100.00	100	100	100.00	100.00	100.00
20	Cakupan Pemberantasan Penyakit Menular :	Persen	60.67	70.67	76.67	70.2	76.67	70.20	91.56
21	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100	6.31	100	100	100.00	100.00	100.00
22	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Persen	80.00	70.86	82.50	69.29	82.50	69.29	83.99
23	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	Persen	83.75	47.36	88.75	100.00	88.75	100.00	112.68

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2014		2015		Realisasi Capaian RPJMD s.d 2015		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
24	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	70.00	54.25	75.00	36.90	75.00	36.90	49.20
25	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00
26	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit Pneumonia Balita	Persen	12.00	16.89	30.25	38.26	30.25	38.26	126.48
27	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00
28	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	Persen	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00
29	Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD	Persen	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00
30	Kepuasan pelayanan RSUD	Persen	73.00	74.10	75.00	75.35	75.00	75.35	100.47
31	Kejadian Infeksi Pasca Operasi	Persen	1.50	0.97	1.45	0.30	1.45	0.30	483.33
32	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam	Persen	75	95.74	80	76.61	80.00	76.61	95.76

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2014		2015		Realisasi Capaian RPJMD s.d 2015		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
	setelah selesai pelayanan								
33	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	61.96	61.73	62.96	62.96	62.96	62.96	100.00
34	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	Persen	9.57	10.02	8.87	10.02	8.87	10.02	112.97
35	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)	Persen	65.00	62.69	65.50	65.55	65.50	65.55	100.08
36	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (unmet need) 5%	Persen	11.69	12.56	11.19	21.34	11.19	21.34	190.71
37	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/ kelurahan	Persen	41.61	33.33	52.02	29.85	52.02	29.85	57.38
38	Jumlah kelompok bina keluarga :								
	<i>Bina Keluarga Balita (BKB)</i>	Kelompok	371.00	356.00	373.00	373.00	373.00	373.00	100.00
	<i>Bina Keluarga Remaja (BKR)</i>	Kelompok	201.00	189.00	203.00	203.00	203.00	203.00	100.00

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2014		2015		Realisasi Capaian RPJMD s.d 2015		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
	<i>Bina Keluarga Lansia (BKL)</i>	Kelompok	251.00	188.00	253.00	253.00	253.00	253.00	100.00
39	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	31.80	31.40	33.00	34.00	33.00	34.00	103.03
40	Jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Kelompok	9.00	9.00	15.00	15.00	24.00	24.00	100.00
41	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persen	32.60	32.70	37.00	38.00	37.00	38.00	102.70
42	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	Persen	29.09	30.00	32.48	33.00	32.48	33.00	101.60

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2014		2015		Realisasi Capaian RPJMD s.d 2015		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
43	Jumlah penerima manfaat kartu sejahtera	Orang	3,520.00	3,383.00	4,800.00	4,539.00	8,320.00	7,922.00	95.22
44	Jumlah transmigrasi Umum	Orang	40.00	16.00	40.00	44.00	80.00	60.00	75.00
45	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7.37	7.30	7.10	7.00	7.10	7.00	101.43
46	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	49.00	-	16.00	50.00	65.00	50.00	76.92
47	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	58.00	40.00	144.00	40.00	202.00	80.00	39.60
48	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	300.00	575.00	300.00	300.00	600.00	875.00	145.83
49	Pengurangan angka pengangguran di perdesaan melalui Padat Karya	Desa	345.00	345.00	345.00	-	345.00	-	-
50	Jumlah pemuda mendapatkan pembinaan	Pemuda	140.00	203.00	140.00	140.00	280.00	343.00	122.50
51	Jumlah penyelenggaraan event olah raga	Event/Tahun	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	5.00	125.00

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2014		2015		Realisasi Capaian RPJMD s.d 2015		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
52	Pembinaan atlet berprestasi	Atlet	-	-	30.00	30.00	30.00	30.00	
53	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Pengunjung	10,300.00	10,300.00	11,845.00	11,845.00	11,845.00	11,845.00	100.00
	Misi 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Pelayanan Publik								
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	1.00	1.00	-	-	1.00	1.00	100.00
2	Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUP	Dokumen	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	150.00
3	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	90.00	90.00	90.50	100.00	90.50	100.00	110.50
4	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Skala	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00
5	Sistim Informasi Manajemen Pemda	Aplikasi	3.00	2.00	1.00	2.00	4.00	4.00	100.00
6	Tertatanya aset daerah	Persen	97.00	95.00	100.00	25.00	100.00	25.00	25.00
7	Opini audit BPK		WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
8	Rasio Kemandirian Daerah	Persen	16.69	13.22	17.99	19.67	17.99	19.67	109.34

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2014		2015		Realisasi Capaian RPJMD s.d 2015		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
9	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat pengembangan	Orang	1,193.00	933.00	481.00	1,147.00	1,674.00	2,080.00	124.25
10	Jumlah aparatur yang terbina	Orang	11,091.00	12,134.00	11,395.00	11,419.00	11,395.00	11,419.00	100.21
11	Jumlah prasarana aparatur pemerintah terbangun dan tertata	Unit	4.00	8.00	3.00	14.00	7.00	22.00	314.29
12	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	Persen	78.00	79.09	80.00	90.15	80.00	90.15	112.69
13	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Persen	81.50	82.85	83.00	87.67	83.00	87.67	105.63
14	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	Persen	42.00	40.04	44.00	45.01	44.00	45.01	102.30
15	Ketersediaan database kependudukan	Persen	93.00	93.35	93.50	94.44	93.50	94.44	101.01
16	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Unit	15.00	15.00	15.00	151.00	30.00	166.00	553.33
17	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapatkan pelatihan	Orang	100.00	340.00	135.00	340.00	235.00	680.00	289.36
	Misi 3. Meningkatkan Perekonomian yang Kokoh Berbasis Ekonomi Kerakyatan								
1	Jumlah koperasi aktif	Unit	691.00	689.00	711.00	709.00	711.00	709.00	99.72

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2014		2015		Realisasi Capaian RPJMD s.d 2015		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
2	Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah								
	- Usaha mikro	Unit	49,140.00	49,205.00	49,388.00	48,892.00	49,388.00	48,892.00	99.00
	- Usaha kecil	Unit	805.00	538.00	825.00	785.00	825.00	785.00	95.15
	- Usaha menengah	Unit	11.00	17.00	13.00	9.00	13.00	9.00	69.23
3	Jumlah Realisasi Investasi Berskala Nasional	Trilyun	1.00	2.85	1.00	10.66	2.00	13.51	675.50
4	Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional :								
	- PMDN	Perusahaan	2.00	4.00	3.00	8.00	5.00	12.00	240.00
	- PMA	Perusahaan	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	100.00
5	Presentase antara realisasi investasi dan peminat investasi	Persen	40.00	41.00	50.00	58.00	50.00	58.00	116.00
6	Meningkatnya ketersediaan pangan pokok dan non pokok								
	- Padi	Ton	550,135.98	575,838.00	561,138.70	625,962.00	561,138.70	625,962.00	111.55
	- Palawija	Ton	32,570.64	22,576.00	33,222.05	25,386.00	33,222.05	25,386.00	76.41
	- Hortikultura	Ton	170,042.16	159,037.00	173,443.00	189,569.00	173,443.00	189,569.00	109.30
7	Daerah Rawan pangan	Kecamatan	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00
8	Sentra Kawasan Unggulan	Lokasi	-	-	-	-	-	-	
9	Produksi daging	Kg	7,996,386.00	8,182,723.00	8,204,292.00	8,337,201.00	8,204,292.00	8,337,201.00	101.62

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2014		2015		Realisasi Capaian RPJMD s.d 2015		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
10	Cakupan Bina Kelompok Tani		2,417.00	2,417.00	2,417.00	2,417.00	2,417.00	2,417.00	
	- Pemula	Kelompok	1,636.00	1,552.00	1,561.00	1,435.00	1,561.00	1,435.00	91.93
	- Lanjut	Kelompok	702.00	786.00	771.00	858.00	771.00	858.00	111.28
	- Madya	Kelompok	79.00	79.00	85.00	124.00	85.00	124.00	145.88
	- Utama	Kelompok	-	-	-	-	-	-	-
11	Meningkatnya produksi hasil tanaman perkebunan (1 % pertahun)	Ton	31,273.14	31,287.54	31,585.87	31,610.43	31,585.87	31,610.43	100.08
12	Meningkatnya produksi hasil hutan non kayu (5 % Pertahun)	Kg	33,888.33	33,957.40	35,582.75	35,743.60	35,582.75	35,743.60	100.45
13	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (2)								
14	Jumlah dan jenis obyek wisata	Lokasi	14.00	7.00	15.00	7.00	15.00	7.00	46.67
15	Jumlah kunjungan wisatawan	Wisatawan	53,741.00	54,917.00	54,115.00	67,295.00	107,856.00	122,212.00	113.31
16	Produksi ikan budidaya	Ton	3,540.00	3,544.70	3,552.00	3,552.06	3,552.00	3,552.06	100.00
17	Produksi ikan tangkap	Ton	4,946.81	4,969.43	5,194.04	5,373.78	5,194.04	5,373.78	103.46
18	Konsumsi ikan	kg Per kapita	15.01	15.05	15.72	16.30	15.72	16.30	103.69
19	Revitalisasi/ Pembangunan Pasar Daerah	Unit	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	5.00	125.00

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2014		2015		Realisasi Capaian RPJMD s.d 2015		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
20	Jenis dan jumlah industri menengah :								
	- Jenis industri	Jenis	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
	- Jumlah industry	Unit	28.00	28.00	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00
21	Jenis dan jumlah industri kecil :								
	- Jenis industry	Jenis	18.00	18.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
	- Jumlah industri	Unit	15,454.00	15,454.00	15,769.00	15,769.00	15,769.00	15,769.00	100.00
	Misi 4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Strategis Wilayah yang Berkualitas								
1	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	Persen	51.32	64.87	57.52	83.24	57.52	83.24	144.71
2	Terbangunnya jalan perdesaan	Km	160.05	167.94	120.00	129.25	280.05	297.19	106.12
3	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	Persen	97.70	98.59	98.28	99.22	98.28	99.22	100.96
4	Persentase tersedianya air irigasi untuk	Persen	63.20	64.10	65.00	66.46	65.00	66.46	102.25

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2014		2015		Realisasi Capaian RPJMD s.d 2015		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
	pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya								
5	Tersedianya Areal Konservasi Sumber Air (Embung)	Unit	2.00	2.00	3.00	-	5.00	2.00	40.00
		Ha	3.40	5.70	3.50	-	6.90	5.70	82.61
6	Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir	Lokasi	4.00	4.00	5.00	1.00	9.00	5.00	55.56
7	Persentase cakupan air bersih	Persen	59.22	60.60	59.97	80.77	59.97	80.77	134.68
8	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Persen	59.50	58.48	60.00	67.18	60.00	67.18	111.97
9	Jumlah fasilitas umum dan sosial terbangun dan tertata di kecamatan	Unit	2.00	3.00	2.00	4.00	4.00	7.00	175.00
10	Tertatanya rumah sehat dan layak huni	Unit	133.00	133.00	100.00	132.00	233.00	265.00	113.73
11	Jumlah Jenis Rambu Terpasang :								
	- Rambu-rambu	Unit	75.00	75.00	80.00	37.00	155.00	112.00	72.26
	- Lampu Lalu Lintas	Unit Warning Light	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	8.00	100.00

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2014		2015		Realisasi Capaian RPJMD s.d 2015		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
	- Marka	M ²	550.00	550.00	500.00	914.00	1,050.00	1,464.00	139.43
12	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan terbangun/terpelihara	Unit	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	100.00
13	Cakupan elektrifikasi	Persen	74.00	74.15	76.00	76.10	76.00	76.10	100.13
14	Terbangunnya jaringan listrik di perkampungan	Kampung	36.00	37.00	50.00	50.00	86.00	87.00	101.16
15	Pemasangan PJU	Titik	110.00	122.00	60.00	154.00	170.00	276.00	162.35
16	Pemeliharaan PJU	Titik	600.00	700.00	620.00	637.00	1,220.00	1,337.00	109.59
	Misi 5. Menjaga Keseimbangan Fungsi Lingkungan dan Pembangunan yang Berkelanjutan								
1	Tingkat cemaran Sungai, Udara dan air tanah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Jumlah perusahaan yang memiliki dan mematuhi AMDAL	Perusahaan	5.00	7.00	7.00	12.00	12.00	19.00	158.33
3	Meningkatnya daerah tangkapan air dan sumber-sumber air yang direhabilitasi disekitar :						-	-	
	- Mata Air	Unit	10.00	15.00	10.00	10.00	20.00	25.00	125.00

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2014		2015		Realisasi Capaian RPJMD s.d 2015		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
	- Bendungan	Unit	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	100.00
	- Sempadan Sungai	Km	2.00	-	2.00	2.00	4.00	2.00	50.00
4	Proporsi Ruang Terbuka Hijau terhadap luas wilayah Perkotaan Kabupaten Lebak (%)	Persen	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	100.00
5	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	50.00	80.00	400.00	400.00	450.00	480.00	106.67
6	Cakupan penanggulangan korban bencana	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Persen	80.00	80.00	82.00	75.00	82.00	75.00	91.46
8	Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (< 1 jam setelah pengaduan)	Kali	20.00	20.00	15.00	11.00	35.00	31.00	88.57
9	Persentase penanganan sampah	Persen	28.57	28.57	28.57	18.83	28.57	18.83	65.92
	Misi 6. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah								
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Ormas	50.00	50.00	75.00	75.00	125.00	125.00	100.00

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2014		2015		Realisasi Capaian RPJMD s.d 2015		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
2	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat	Kegiatan	1.00	1.00	4.00	4.00	5.00	5.00	100.00
3	Tertanganinya kasus Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persen	82.00	82.00	82.50	82.50	82.50	82.50	100.00
4	Meningkatnya peran FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama)	Kegiatan	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	100.00
5	Tingkat penegakan perda	Persen	90.00	90.00	85.00	99.00	85.00	99.00	116.47
6	Terselenggaranya kegiatan keagamaan	Kegiatan	2.00	2.00	4.00	4.00	6.00	6.00	100.00
7	Terpeliharanya sarana dan prasarana keagamaan	Unit	20.00	20.00	20.00	1,222.00	40.00	1,242.00	3,105.00

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory. Beberapa permasalahan yang bersifat strategis dan perlu penanganan :

1. Terbatasnya sumberdaya aparatur di beberapa SKPD yang berdampak pada belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
2. Meningkatnya arus distribusi barang dan manusia terutama pada ruas jalan strategis penghubung antara lebak utara, lebak tengah dan lebak selatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan yang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.
3. Belum adanya regulasi yang lebih spesifik terkait dengan pemanfaatan lahan, terutama lahan pertanian berkelanjutan, yang berakibat pada rendahnya daya tahan keberlanjutan pembangunan pertanian, dimana pertanian merupakan sektor utama lapangan kerja masyarakat kabupaten Lebak.
4. Sebaran penduduk kabupaten yang cukup merata pada wilayah kabupaten Lebak yang luas, cukup menyulitkan dalam memberikan layanan publik, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Kondisi ini dapat dilihat dengan masih rendahnya APK SMA/Sederajat dan masih adanya penduduk yang berjarak lebih dari 5 Km dari tempat pelayanan kesehatan seperti Puskesmas maupun Pustu.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Secara alamiah, permasalahan pembangunan daerah dikonstruksi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar. Permasalahan internal bersumber pada adanya sejumlah kelemahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mendayagunakan sumberdaya pembangunan daerah sehingga menyebabkan tidak optimalnya kinerja pembangunan sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena adanya berbagai potensi ancaman yang tidak terantisipasi sehingga kemudian bermanifes sebagai masalah dalam kehidupan sosial. Berangkat dari pemahaman inilah maka identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Lebak akan dirumuskan, yang pada satu sisi berfokus pada pemerintah daerah beserta segenap instrumentasinya, dan di sisi lain menelaah berbagai hal dengan pendekatan sektoral sesuai dengan urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lebak sebagaimana diatur dalam pasal 12 dan 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengklasifikasi urusan pemerintahan wajib menjadi urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, dan urusan penunjang. Permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain tersaji dalam tabel 2.19 berikut ini:

Tabel 2.19

Permasalahan Daerah Menurut Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Urusan / Bidang Urusan	Permasalahan
I.	Urusan Wajib	
1.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya layanan pendidikan anak usia dini; 2. Terbatasnya layanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar; 3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan; 4. Masih tingginya angka putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah; 5. Terbatasnya layanan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah; 6. Terbatasnya jumlah tenaga pendidik dan

No	Urusan / Bidang Urusan	Permasalahan	
		7. 8. 9.	kependidikan dengan kompetensi dan distribusi yang belum merata; Belum optimalnya layanan pendidikan Non Formal; Sistem informasi manajemen yang menyajikan data dan informasi belum berjalan baik; dan Kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing.
2.	Kesehatan	1. 2. 3. 4. 5.	Perilaku masyarakat di bidang kesehatan masih rendah; Kondisi kesehatan lingkungan masih rendah; Masih kurangnya pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan; Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; dan Terbatasnya tenaga kesehatan.
3.	Pekerjaan Umum	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Kurangnya Ketersediaan jalan yang menghubungkan ke pusat-pusat kegiatan; Tingginya tingkat kerusakan jalan; Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan; dan Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pendukung pelayanan jasa alat berat. Tingginya kerusakan jaringan irigasi kurangnya penyediaan sumber air baku untuk air minum dan irigasi. Masih banyak masyarakat yang belum mengakses air bersih; Masih banyak masyarakat yang belum mengakses infrastruktur sanitasi; dan Masih rendahnya PSU permukiman.
4.	Perumahan		Rendahnya kualitas hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah
5.	Penataan Ruang	1. 2.	Kurangnya Ketaatan Terhadap RTRW; dan Kurangnya Rencana Rinci Tata Ruang.
6.	Perencanaan Pembangunan	1. 2.	Sinkronisasi antar dokumen rencana pembangunan daerah belum optimal; Masih perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas Perencanaan.
7.	Perhubungan	1. 2.	Kurangnya fasilitas keselamatan jalan; dan Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan.
8.	Lingkungan Hidup	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; Kurang tersedianya pos jaga hutan, Batas zonasi TNHGS yang belum sinkron antara Kementerian Kehutanan dengan Masyarakat yang termasuk dalam areal perluasan TNGHS Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau di areal perkotaan; Terbatasnya ruang terbuka bagi publik; Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup; Rendahnya ketaatan para pelaku usaha dan/ atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;

No	Urusan / Bidang Urusan	Permasalahan
		<ol style="list-style-type: none"> 9. Adanya persaingan pemanfaatan air untuk irigasi dan penggunaan air untuk sektor lain; 10. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana persampahan 11. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan / mitigasi bencana; 12. Kurangnya Sarpras dan SDM bidang Penanggulangan Bencana; dan 13. Banyaknya daerah rawan bencana.
9.	Kependudukan dan Catatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penyerasian perkembangan kependudukan; dan 2. Kurangnya Pembinaan kepada masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan sipil.
10.	Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan; 2. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi; dan 3. Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah.
11.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi; 2. Rendahnya Tingkat partisipasi KB pria; 3. Kurangnya Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (KB); 4. Belum optimalnya pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); 5. Rendahnya tingkat kepesertaan KB dari pasangan usia subur; 6. Belum optimalnya Pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); dan 7. Pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga (BKB, BKL, BKR dan PKLK) belum optimal.
12.	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya orang terlantar, Anak jalanan, Anak berhadapan dengan hukum, Anak korban tindak kekerasan, korban Trafficking, korban penyalahgunaan Napza dan perlunya rehabilitasi korban bencana alam dan bencana sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; 2. Belum optimalnya pemberdayaan dan pembinaan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
13.	Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas/SDM para pencari kerja (penganggur) dan peluang kerja; dan 2. Banyaknya kasus PHK dan kasus ketenagakerjaan lainnya.
14.	Koperasi dan UKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya daya saing produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

No	Urusan / Bidang Urusan	Permasalahan
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Masih terbatasnya akses pembiayaan, informasi dan kelembagaan; dan 3. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi dan UKM.
15.	Penanaman Modal Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Optimalnya promosi yang dilakukan dalam rangka peningkatan pertumbuhan investasi; 2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat/stakeholders tentang regulasi investasi dan penanaman modal; 3. Pengelolaan pelayanan investasi dan penanaman modal belum memanfaatkan pengembangan teknologi informasi secara optimal.
16.	Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terdatanya potensi seni dan budaya masyarakat; 2. Belum optimalnya penerapan budaya dan kearifan lokal; 3. Belum optimalnya fungsi kawasan budaya dan pelaku budaya; dan 4. Kurangnya fasilitas kesenian.
17.	Pemuda dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sarana dan prasana untuk memudah aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri; 2. Jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda masih rendah; dan 3. Terbatasnya sarana dan pembinaan olah raga.
18	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya Pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Daerah; 2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan; dan 3. Masih rendahnya pemahaman tentang aliran/ajaran agama yang sudah ditetapkan / disahkan.
19.	Pemerintahan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip good governance; 2. Belum adanya norma, standar, pedoman dan manual yang jelas terkait prosedur pelayanan di setiap SKPD; 3. Pengawasan Internal dan Pengendalian yang berkelanjutan belum optimal; 4. Ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan masih tinggi; 5. Belum optimalnya penataan aset-aset daerah; 6. Belum semua pelayanan publik sesuai harapan masyarakat; 7. Masih rendahnya kapasitas, profesionalisme dan jumlah sumber daya manusia aparatur; dan 8. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan kepada masyarakat.
20.	Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada beberapa SKPD jumlah aparatur masih kurang.
21.	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan utama adalah masih rendahnya kinerja pelayanan publik pemerintah desa
22.	Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan utama adalah terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan.

No	Urusan / Bidang Urusan	Permasalahan
23.	Komunikasi dan Informasi	1. Sebaran Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika belum optimal
24.	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas SDM kelompok tani; 2. Tingginya resiko kerentanan yang dihadapi petani; 3. Belum optimalnya fungsi kelembagaan petani; 4. Sempitnya penguasaan lahan milik petani; 5. Masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi pengolahan produk pertanian; 6. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian; 7. Terbatasnya ketersediaan alat pasca panen Pertanian; 8. Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan Potensial belum di kelola secara optimal; 9. Subsektor peternakan masih didominasi oleh para peternak dengan skala usaha terbatas dan belum menjadi usaha pokok; 10. Terbatasnya bibit ternak baik kualitas dan kuantitas; 11. Rendahnya penguasaan dan penerapan teknologi dan informasi peternakan; 12. Penyakit Hewan menular masih menjadi Ancaman; 13. Masih terdapat pemotongan hewan betina produktif tanpa dukungan upaya penyelamatan dan pencegahannya yang belum memadai; 14. Panjangnya sistem tata Niaga Produk Pertanian, Peternakan dan Perkebunan; dan 15. Belum jelasnya wilayah kawasan usaha peternakan.
25.	Pariwisata	1. Belum optimalnya pengelolaan objek wisata potensial baik dari pengaturan regulasi, promosi dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang.
26.	Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan SDM nelayan; 2. Rendahnya produktivitas usaha perikanan; 3. Masih rendahnya sistem alih teknologi pengolahan produk hasil perikanan; 4. Lemahnya kelembagaan dan posisi tawar pembudidaya, nelayan dan pengolahan ikan; 5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan selain perikanan; dan 6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana baik secara kualitas dan kuantitas dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi ikan budidaya dan tangkap.
27.	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan; dan 2. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian barang beredar dari alur distribusi dan konsumsi.
28.	Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produktivitas IKM masih rendah; 2. Skala usaha masih cenderung perorangan
29.	Transmigrasi	1. calon transmigran belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

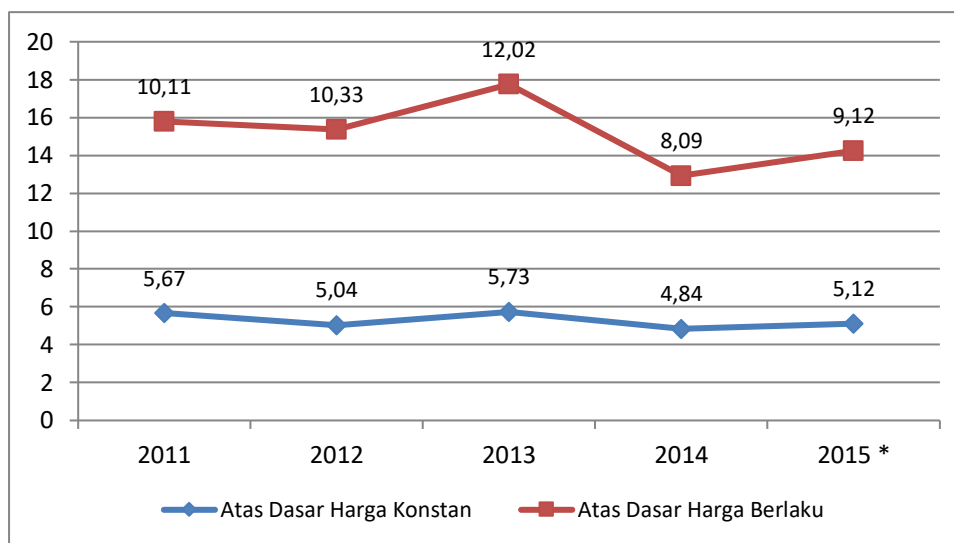
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada bab ini juga dibahas mengenai tantangan perekonomian Kabupaten Lebak serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah, dengan tetap memperhatikan RPJMD Perubahan Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019. Selain itu, Rancangan kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah, yang digunakan sebagai gambaran umum untuk menilai situasi karakteristik perekonomian Kabupaten Lebak pada Tahun 2015, serta prospek perekonomian pada tahun 2016-2017.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016

Perkembangan ekonomi Kabupaten Lebak selama kurun waktu 2011-2015 cenderung fluktuatif. Secara rerata pertumbuhan ekonomi masih diatas 5%. Diantara tahun tersebut, tahun 2014 merupakan tahun terberat, dengan capaian pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,84%. Faktor utama penyebab lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada bulan November Tahun 2014. Kenaikan harga tersebut menjadi beban pada biaya distribusi sehingga menyebabkan naiknya beberapa komoditas bahan pokok masyarakat. Kenaikan harga BBM merupakan dampak langsung dari kebijakan Pemerintah Pusat yang mengurangi subsidi BBM. Pemerintah berasumsi pengurangan subsidi BBM tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan belanja infrastruktur. Infrastruktur yang dibangun diharapkan mampu menggerakkan sektor ekonomi agar mampu tumbuh lebih tinggi. Hal ini tampak dengan melihat proyeksi capaian nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2015 sebesar 5,12. secara jelas dapat dilihat pada grafik 3.1 berikut :

Grafik 3.1
Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2011-2015



*) Angka Proyeksi

Beberapa fenomena ekonomi yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak antara lain terjaganya pertumbuhan pada sektor pertanian yang merupakan sektor utama penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Lebak pada tahun 2015. Selain itu pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran juga tetap tumbuh dengan baik.

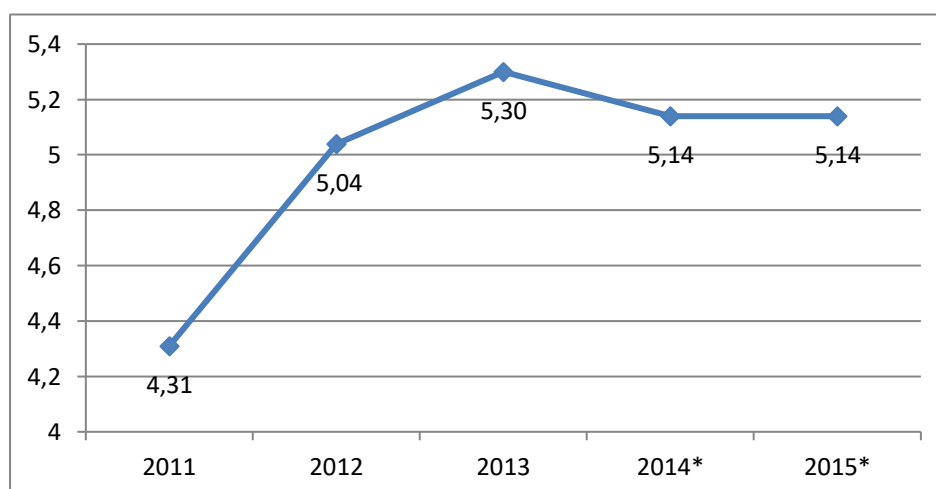
Pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 5,32. Laju Pertumbuhan ekonomi Tahun 2016 diproyeksikan lebih besar dibandingkan tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi didorong oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut :

- a. Dengan meningkatnya APBDes pada tahun 2016 seiring meningkatnya alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat dan bertambahnya dana perimbangan dari Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggerakkan sektor riil dimasyarakat. Salah satu caranya melalui pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang bersifat swakelola dengan pola pemberdayaan masyarakat. Dampak dari pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan akses barang dan jasa dari pusat-pusat produksi masyarakat kepada pasar, ataupun sebaliknya dapat lebih luas dan lebih mudah.
- b. Peningkatan aksesibilitas jalan strategis yang menghubungkan pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya.

- c. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan dengan penopang utamanya yaitu produksi semen yang lebih besar.
- d. Sektor Bangunan yang terus tumbuh dengan baik, seiring meningkatnya pembangunan perumahan di wilayah permukiman sebagaimana Rencana tata ruang wilayah.
- e. Penyediaan sarana dan prasarana yang lebih baik bagi sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Hal ini dikarenakan hampir 60% penduduk kabupaten lebak bekerja pada sektor ini. Dengan kebijakan ini diharapkan Kabupaten Lebak tetap menjadi lumbung pangan nasional. Selain itu Kabupaten Lebak juga terus mengembangkan beberapa komoditas yang diproyeksikan mampu bersaing dan menjadi komoditas unggulan, seperti Pisang, Ikan Air Tawar, Aren, Bambu dan Kerbau. Komoditas tersebut dijual bukan hanya dalam bentuk bahan mentah, juga dalam bentuk hasil pengolahan supaya memberikan nilai tambah lebih bagi masyarakat.

Tingkat inflasi Kabupaten Lebak dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuatif. Dalam kurun waktu tersebut tingkat inflasi berkisar pada 4,31 - 5,14. Inflasi di Kabupaten Lebak lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal diantaranya kenaikan harga BBM yang mengakibatkan kenaikan harga beberapa komoditi kebutuhan masyarakat. Perkembangan inflasi Kabupaten Lebak pada tahun 2010 -2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

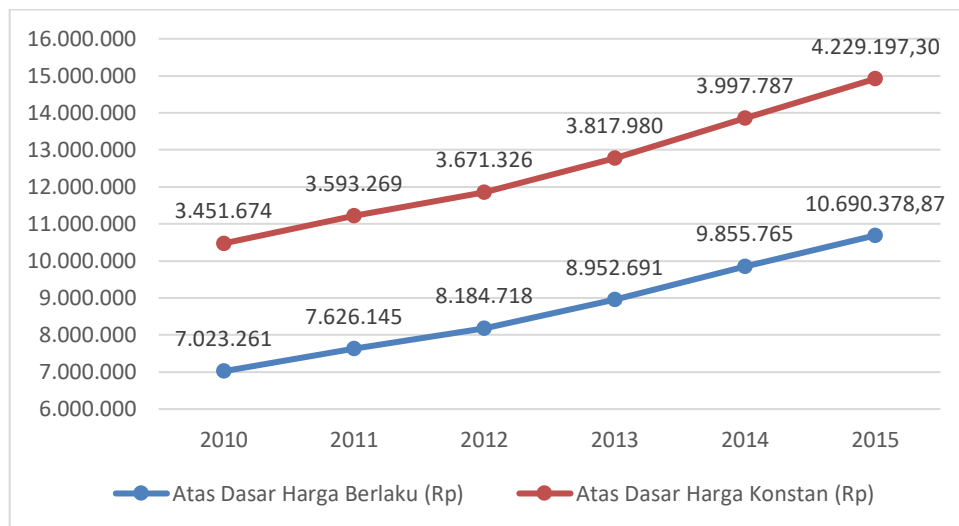
Grafik 3.2
Inflasi Kabupaten Lebak 2011 - 2015



Sumber : BPS Kab. Lebak

Selanjutnya, tingkat kemakmuran masyarakat secara makro dapat digambarkan dengan indikator pendapatan per kapita atau percapita income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut bertambah baik.

Grafik 3.3
PDRB Per kapita Kabupaten Lebak Tahun 2010-2015



Sumber : BPS Kabupaten Lebak

Grafik 3.3 memperlihatkan bahwa PDRB perkapita Kabupaten Lebak terus mengalami peningkatan yang terus menerus selama periode 2010-2014. Tahun 2010 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 7.023.261 dan pada tahun 2015 diperkirakan mampu mencapai pada kisaran Rp. 10.690.378,87. Sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan dari Rp. 3.451.674 pada tahun 2010 dan pada tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp. 4.229.197,30.

Meskipun PDRB perkapita mengalami peningkatan yang cukup baik, kita pun menyadari bahwa pertumbuhan PDRB perkapita yang terjadi belum mampu menekan persentase angka kemiskinan sampai dengan 5%. Namun demikian persentase angka kemiskinan kita yang mencapai 8,6% sudah termasuk melebihi target MDG's yang mencanangkan batas maksimal kemiskinan sebesar 10%.

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, artinya kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan

dan non makan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Dengan memperhatikan kondisi perekonomian Kabupaten Lebak pada Tahun 2015, maka perkiraan kondisi indikator makro ekonomi Kabupaten Lebak tahun 2016, sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini .

Tabel 3.1
Perkiraan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lebak Tahun 2015

No.	Indikator Makro	2016
1.	PDRB (adh. Konstan Thn. 2000) (Rp. Juta)	5.631.007
2.	PDRB (adh. Berlaku Thn. 2000) (Rp. Juta)	15.062.387
3.	PDRB per Kapita (adh. Konstan Thn. 2000) (Rp. Juta)	4.224.463
4.	PDRB per Kapita (adh. Berlaku Thn. 2000) (Rp. Juta)	11.300.022
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,11
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	69,44
7.	Prosentase Penduduk Miskin	6,64%
8.	Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,80%
9.	Penurunan Laju Inflasi (%)	5,30

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017

Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Lebak di tahun 2017 tentunya tidak terlepas dari pengaruh perekonomian tingkat regional dan perekonomian nasional. Pada tahun 2017 diharapkan kualitas infrastruktur penghubung (jalan maupun jembatan) antar wilayah di Kabupaten Lebak semakin baik, dengan demikian diharapkan arus manusia dan distribusi barang semakin cepat dan mengurangi beban biaya produksi. Dengan tersedianya prasarana infrastruktur yang berkualitas tersebut diharapkan perekonomian masyarakat yang bersifat *home industry* mempunyai kemudahan dalam memasarkan produknya.

Pasar bebas bagi asia tenggara, mendorong kita untuk terus meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan produktivitas barang dan jasa berdasarkan potensi lokal melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat setempat, serta mempersiapkan pasar maupun konsumen sebagai jaminan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat.

Adapun karakteristik komoditas unggulan yang dikembangkan yaitu :

- Harus Mampu Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Perekonomian
- Mempunyai Keterkaitan dengan masyarakat
- Mampu bersaing dengan produks sejenis dari daerah lainnya baik dalam harga produk, biaya produksi dan pelayanan
- Memiliki keterkaitan dengan wilayah lainnya baik dalam hal pasar konsumen maupun pemasok bahan baku
- Memiliki status teknologi yang terus meningkat, melalui inovasi teknologi
- Mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya
- Dapat bertahan dalam jangka penjang
- Tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal
- Mendapat dukungan keamanan, sosial, budaya, dan kelembagaan
- Berorientasi pada kelestarian sumber daya dan lingkungan

Ditingkat regional tentu saja Kabupaten Lebak sangat membutuhkan dukungan Pemerintah Provinsi Banten. Indeks Pembangunan Manusia tingkat Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten menempatkan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang termasuk peringkat 2 terbawah. Dengan demikian segala upaya harus terus dilakukan terutama untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah; meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan daya beli masyarakat. Sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Lebak dan Pemerintah Provinsi Banten harus senantiasa mengalami peningkatan melalui Koordinasi yang lebih terarah dan terukur, sebagai upaya menempatkan Program dan Kegiatan yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Sehingga Program dan Kegiatan yang dilakukan dengan sinergi mampu menjadi daya ungkit yang optimal bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lebak yang saat ini baru mencapai 61,64 (Tahun 2014).

Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang didukung oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi, serta Privat sektor dan masyarakat, diharapkan pada tahun 2017 perekonomian Kabupaten Lebak diperkirakan tumbuh sebesar minimal 5%.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, kapasitas fiskal daerah, serta tujuan pembangunan daerah. Adapun kebijakan pengelolaan keuangan daerah meliputi komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan pengelolaan keuangan yang baik diharapkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah dapat tercapai guna mendukung arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelolaan pendapatan daerah, perlu diingat bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka kewenangan pengelolaan pajak bagi Kabupaten/Kota meliputi 11 jenis pajak sebagai berikut :

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
7. Pajak Parkir,
8. Pajak Air Tanah,
9. Pajak Sarang Burung Walet,
10. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan,
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).



Sedangkan untuk Retribusi Daerah, bila mengacu pada peraturan tersebut di atas, jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk diperluas sesuai dengan peraturan dan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Lebak telah mengenakan retribusi terhadap 8 jenis Retribusi Jasa Umum, 7 jenis Retribusi Jasa Usaha, dan 4 jenis Retribusi Perijinan Tertentu.

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (13) merupakan hak penerimaan Daerah yang diakui sebagai penerimaan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Berdasarkan ketentuan di atas, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Kabupaten terdiri dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, 2) Dana Perimbangan yang terdiri atas : Dana Bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi hasil Pajak dari Prov. Dan Pemda Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus, Bantuan Keuangan dari Prov/ kab/ kota/ lainnya, Lain-lain Penerimaan.

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2017 mengarah pada peningkatan penerimaan daerah melalui :

1. Optimalisasi SDM Pengelola Pendapatan Daerah terutama yang terdapat UPTD yang mengelola pendapatan di tiga wilayah (Lebak Utara, Lebak Tengah dan Lebak Selatan);
2. Pemantapan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
3. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah, dan kemampuan masyarakat (tidak membebani pertumbuhan dunia usaha) dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
4. Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan SKPD Pengelola Pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat;
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
6. Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
7. Penerapan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari potensi investasi daerah serta pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui

skema kerjasama “*Public-Private Partnership*” maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Berdasarkan kebijakan tersebut diharapkan pendapatan daerah Kabupaten Lebak meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.



Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Tahun 2014-2017

No	Uraian	Jumlah(Rp)				
		Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017 (RPJMD P)	Proyeksi Tahun 2017 (RKPD)
1	PENDAPATAN	1.797.491.578.883	2,237,374,128,692	2.432.689.731.115	2,207,397,804,330	2,207,397,804,330
1.1	<i>Pendapatan asli daerah</i>	245.707.844.192	301,306,361,051	264.865.750.179	316,083,461,040	316,083,461,040
	a. Pajak daerah	51.035.621.198	56,180,591,358	47.477.100.100	56,365,000,000	56,365,000,000
	b. Retribusi daerah	140.995.631.328	162,874,967,012	13.023.319.540	14,968,461,040	14,968,461,040
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.715.635.556	2,671,126,989	1.763.830.639	3,000,000,000	3,000,000,000
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	49.960.956.110	79,579,675,692	202.601.500.000	241,750,000,000	241,750,000,000
1.2	<i>Dana perimbangan</i>	1.167.914.121.130	1,321,281,755,154	1.847.483.360.320	1,556,097,837,790	1,556,097,837,790
	a. Dana bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	62.819.506.130	46,384,875,154	58.749.230.000	59,256,000,000	59,256,000,000
	b. Dana alokasi umum	1.000.878.505.000	1,029,228,685,000	1.100.336.786.000	1,116,841,837,790	1,116,841,837,790
	c. Dana alokasi khusus	104.216.110.000	149,696,070,000	688.397.334.320	380,000,000,000	380,000,000,000
	d. Alokasi Dana Desa		95,972,125,000		-	-
1.3	<i>Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	383.869.613.561	614,786,012,487	320.340.620.616	335,216,505,500	335,216,505,500
	a. Pendapatan Hibah	1.690.400.000	5,507,360,000		-	-
	b. Dana Darurat				-	-
	c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	74.379.651.961	96,308,670,987	71.008.726.616	90,315,000,000	90,315,000,000
	d. Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	217.357.669.000	343,113,705,000	249.331.894.000	244,901,505,500	244,901,505,500

No	Uraian	Jumlah(Rp)				
		Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017 (RPJMD P)	Proyeksi Tahun 2017 (RKPD)
	e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya	90.433.932.000	169.876.276.500	-	-	
	f. Pendapatan Lainnya	7.960.600		-	-	-

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada kecenderungan realisasi dan target pendapatan daerah dalam kurun waktu 2014-2017 terjadi peningkatan yang bervariasi. Capaian dan target pendapatan selama kurun waktu tahun 2014-2017 didukung oleh penambahan dana perimbangan dari pusat yang semakin besar juga tambahan alokasi dana desa. Selain itu kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat. Perlu adanya upaya-upaya peningkatan pendapatan yang lebih intensif dilakukan disertai dengan peningkatan pelayanan publik serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang lebih aktif, diharapkan pada tahun 2017 pendapatan daerah Kabupaten Lebak dapat mengalami peningkatan yang signifikan.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dengan keterbatasan anggaran yang terjadi setiap tahun, maka diharapkan belanja daerah yang disusun bersifat holistik, tematik, integrative dan spasial. Kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2017 diarahkan untuk :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan dalam rangka meningkatkan Angka Harapan Hidup
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka meningkatkan Rata-rata lama sekolah dan Angka melek huruf.
3. Meningkatkan aksesibilitas perekonomian yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Pembangunan Infrastruktur wilayah yang mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Meminimalisir dampak bencana alam melalui penanganan yang bersifat preventif maupun kuratif.
6. Meningkatkan kualitas layanan publik yang mampu mendorong pertumbuhan kewirausahaan pada sektor riil.

Namun mengingat pendanaan yang relatif terbatas, maka ditempuh upaya pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien melalui :

1. Peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.
2. Penerapan pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang disertai sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan.
3. Pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah tahun 2017.
4. Peningkatan alokasi anggaran untuk kesehatan guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan minimal 10%.
5. Pengalokasian kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a. Pemenuhan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil);
 - c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi, serta perencanaan;
 - d. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Lebak mewujudkan Lebak Sehat, Lebak Pintar dan Lebak Sejahtera;
6. Peningkatan efektivitas belanja bantuan sosial kepada organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat, belanja hibah yang diperuntukkan bagi lembaga/organisasi dan kelompok masyarakat, serta belanja bantuan keuangan kepada partai politik yang diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak.
7. Pengalokasian belanja tidak terduga sebagai bentuk antisipasi terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

Berdasarkan kebijakan tersebut proporsi belanja daerah Kabupaten Lebak sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Tahun 2014-2017

No	Uraian	Jumlah (Rp)				
		Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017 (RPJMD - P)	Proyeksi Tahun 2017 (RKPD) Revisi
2.	BELANJA	1.725.712.036.567	1.924.710.579.092	2.449.589.146.735	2,237,935,344,850	2,237,935,344,850
2.1	Belanja Tidak Langsung	985.304.707.216	1.170.509.858.299	1.584.047.641.840	1.374.474.344.850	1,374,474,344,850
2.1.1	Belanja Pegawai	865.417.734.110	960.834.873.445	1.199.170.164.000	950,000,000,000	950,000,000,000
2.1.2	Belanja Hibah	64.993.317.200	24.905.532.760	34.366.747.000	36,980,670,000	36,980,670,000
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	2.842.571.690	6.925.284.000	7.800.000.000	11,967,898,000	11,967,898,000
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	27.777.332.316	76.908.297.976	6.051.000.000	7,133,346,104	7,133,346,104
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	1.152.517.500	97.036.840.802	332.554.567.984	363,791,857,263	363,791,857,263
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	3.121.234.400	3.899.012.316	4.105.162.856	4,600,573,483	4,600,573,483
2.2	Belanja Langsung	760.407.329.351	754.200.720.793	865.541.504.895	863,461,000,000	863,461,000,000
2.2.1	Belanja Pegawai	29.804.665.700	18.738.477.500	31.804.009.500	3,384,392,214,098.25	3,384,392,214,098.25
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	335.389.209.955	336.841.779.740	457.913.024.865	38,084,259,769,579.20	38,084,259,769,579.20
2.2.3	Belanja Modal	395.213.453.696	398.620.463.553	375.824.470.530	44,877,448,016,322.60	44,877,448,016,322.60

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Bila selama ini Pemerintah Kabupaten Lebak terlalu mengandalkan penerimaan pembiayaan dari SiLPA, maka ke depan akan diupayakan untuk mengoptimalkan penggalian sumber penerimaan dari pos lain seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, akan mencakup: penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi:

1. Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan untuk pembayaran dan penyertaan PDAM dalam rangka meningkatkan cakupan air bersih;
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman dilakukan manakala terjadi surplus anggaran;

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lebak pada tahun 2014 - 2017 tersaji pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.4

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2014-2017

No	Uraian	Jumlah (Rp)				
		Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017 (RPJMD)	Proyeksi Tahun 2017 (RKPD)
3.	PEMBIAYAAN	52.094.925.490	118.054.117.139,15	208,783,459,286	35,168,979,593	35,168,979,593
3.1	Penerimaan Pembiayaan	58.625.328.490		262,990,961,286	75,168,979,593	75,168,979,593
3.1.1	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	58.575.646.490	122.788.744.530,15	262,990,961,286	75,168,979,593	75,168,979,593
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	49.682.000	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	6.530.403.000	4.734.627.391	54,207,502,000	40,000,000,000	40,000,000,000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			15,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.530.403.000	4.734.627.391	39,207,502,000	5,000,000,000	5,000,000,000
	Jumlah Pembiayaan Netto	52.094.925.490	118.054.117.139,15	208,783,459,286	35,168,979,593	35,168,979,593

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran pembangunan

Berdasarkan kerangka kebijakan pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 (P), maka kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak tahun 2017, harus tetap memperhatikan konsistensi dan sinkronisasi terhadap kerangka kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Pembangunan tahun 2017, diarahkan pada Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Peningkatan Kualitas Pembangunan. Untuk menjamin terlaksananya kebijakan pembangunan daerah tersebut perlu dilakukan penguatan pada tahap pelaksanaan dan evaluasi terhadap pembangunan untuk menjamin keberhasilan pembangunan serta menyelesaikan permasalahan strategis sesuai dengan target sasaran kinerja RPJMD. Selain itu pembangunan yang dilakukan juga melalui pendekatan pembangunan yang bersifat holistic, tematik, integral dan spasial.

Dalam menyusun perencanaan diperlukan tujuan yang terarah. Tujuan tersebut merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasi visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lebak mengacu pada visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019, yaitu

***“Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya saing melalui
Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi
Kerakyatan”***

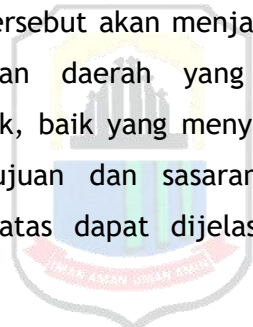
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

- Misi 1** : ***Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif***, hal ini ditunjukkan dengan kondisi sumberdaya manusia yang berdaya saing dengan kompetensi yang mumpuni, kreatif, inovatif yang didukung dengan moralitas yang berbasis agama yang kokoh;
- Misi 2** : ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi Pelayanan Publik***, kondisibirokrasi berperan sebagai katalisator pembangunan dengan karakteristik organisasi yang respon terhadap tuntutan publik terhadap kinerja pelayanan, dengan tetap memegang teguh asas transparansi dan akuntabel;
- Misi 3** : ***Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan***, kondisi perekonomian yang kokoh yang mengandalkan kekuatan ekonomi kerakyatan akan menciptakan Kabupaten Lebak menjadi daerah yang mampu bertahan dari berbagai permasalahan ekonomi baik yang disebabkan dari aktifitas ekonomi domestik maupun aktifitas ekonomi global sehingga akan memposisikan Kabupaten Lebak yang mampu bersaing dengan daerah sekitar melalui penguatan ekonomi usaha/industri kecil dan menengah, pariwisata dan sector pertanian serta pengembangan investasi baik yang dilakukan Pemerintah maupun Swasta;
- Misi 4** : ***Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur strategis Wilayah yang berkualitas***, hal ini ditunjukkan dengan pembangunan infrastruktur yang memperiotaskan memperluas akses terhadap pusat-pusat kegiatan masyarakat terutama pada bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Selain itu pembangunan infrastruktur yang dilakukan mengoptimalkan pemberdayaan sumberdaya setempat dengan tetap memperhatikan kualitas;
- Misi 5** : ***Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan***, Kabupaten Lebak tetap memposisikan diri

sebagai wilayah daerah resapan air. Dengan kondisi tersebut maka pembangunan yang dilaksanakan tetap mempertimbangkan aspek ekologi sehingga terjaga kelestarian lingkungan yang mendukung pola pembangunan yang berkelanjutan;

Misi 6 : *Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah*, hal ini ditunjukkan dengan kondisi Lebak menjadi tempat yang nyaman bagi siapa saja, untuk melakukan segala aktivitas dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi di atas, maka diperlukan adanya kerangka kerja logis yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada kelima misi tersebut. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan tersebut akan menjadi arahan dalam pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Lebak, baik yang menyangkut urusan wajib maupun urusan pilihan. Adapun tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagaimana diuraikan di atas dapat dijelaskan dalam matriks sebagai berikut:



Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI “Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya saing melalui Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan”		
MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar 2. Membangun sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan kompetitif dengan tetap mempertahankan ciri masyarakat yang santun berbudaya	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang terjangkau dan merata 2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata 3. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia 4. Meningkatnya peran

VISI “Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya saing melalui Pematapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan”		
MISI	TUJUAN	SASARAN
		<p>pemuda dan olahraga</p> <p>5. Terpelihara dan termanfaatkannya benda cagar budaya dan nilai-nilai budaya lokal</p> <p>6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan</p>
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan	7. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan	4. Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan	<p>8. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Investasi</p> <p>9. Meningkatnya Ketahanan pangan Daerah</p> <p>10. Meningkatnya hasil produksi perkebunan dan kehutanan</p> <p>11. Tumbuhnya Industri Pariwisata unggulan daerah</p>
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas	<p>5. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur</p> <p>6. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur Transportasi</p>	<p>12. Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan</p> <p>13. Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat</p> <p>14. Meningkatnya ketersediaan sarana dan Prasarana dasar masyarakat</p> <p>15. Meningkatnya Kualitas Perumahan Permukiman</p> <p>16. Meningkatnya pemenuhan listrik masyarakat</p> <p>17. Meningkatnya kualitas prasarana & fasilitas LLAJ</p>

VISI “Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya saing melalui Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan”		
MISI	TUJUAN	SASARAN
		18. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan
5. Menjaga Keseimbangan Fungsi Lingkungan & pembangunan yang berkelanjutan	7. Meningkatkan kelestarian lingkungan 8. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	19. Meningkatnya rehabilitasi lahan 20. Meningkatnya fungsi daerah tangkapan air 21. Terjaganya tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah di bawah ambang batas 22. Meningkatnya kuantitas pengelolaan sampah dan limbah 23. Pengendalian dan pemanfaatan ruang 24. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah	9. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah	25. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 26. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama di masyarakat

Indikator target kinerja pada tahun 2017 untuk setiap Misi sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Sasaran untuk Setiap Misi Tahun 2017

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang terjangkau dan merata	APK PAUD (%)	29,00
		APK SLTP (%)	98,99
		APK SLTA (%)	-
		APM SD/MI (%)	98,93
		APM SLTP (%)	85,95
		APM SLTA (%)	-
		APS SLTP (%)	94,00
		APS SLTA (%)	-
		Angka Putus Sekolah SD (%)	0,24
		Angka Putus Sekolah SLTP (%)	0,15
		Angka Putus Sekolah SLTA (%)	-
		Angka Kelulusan SD (%)	97,63
		Angka Kelulusan SLTP (%)	94,20
		Angka Kelulusan SLTA (%)	-
		Angka Melanjutkan dari SD ke SMP (%)	94,70
		Angka Melanjutkan dari SLTP ke SLTA (%)	86,78
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	5,93
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (Persen)	86,90		
Angka Melek Huruf (%)	98,44		

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
	2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata	Angka Kematian Ibu (AKI) (/100.000 KH)	175,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) (/1.000 KH)	21,00
		Angka Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	63,47
		Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	0,57
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki	79,00
		Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) (%)	71,00
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100
		Cakupan Pemberantasan Penyakit Menular	68,00
		Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%)	76
		Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani (%)	88,90
		Cakupan pelayanan anak balita (%)	85,51
		Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	100
		Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit Pneumonia Balita (%)	50,00
		Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam (%)	100
		Kejadian Infeksi Pasca Operasi (%)	0,50
Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan (%)	95		

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100
		Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS /	100
		Kepuasan pelayanan RSUD (%)	80,00
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%)	9,51
		Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (%)	66,50
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (%)	10,99
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB)	85,00
		Jumlah kelompok bina keluarga : - Bina Keluarga Balita (BKB) (Kelompok) - Bina Keluarga Remaja (BKR) (Kelompok) - Bina Keluarga Lansia (BKL) (Kelompok)	377
	3. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10,40
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Orang)	32
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (Orang)	224
		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (Orang)	300
		Jumlah Transmigrasi Umum (Orang)	40

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		Penanganan pe-nyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	46,00
		Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu (%)	38,33
		Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	39,00
		Jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejah-teraan sosial (Kelompok)	15
		Jumlah penerima manfaat kartu sejahtera (Orang)	8.300
		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	64,96
		4. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga	Jumlah pemuda mendapatkan pembinaan (Pemuda)
		Jumlah penyelenggaraan event olahraga (Event/Tahun)	1
		Pembinaan atlet berprestasi (Atlet)	116
	5. Terpelihara dan termanfa- atkannya benda cagar budaya dan	Cakupan pemeliharaan benda cagar budaya	100
		Jumlah event budaya (Event/Tahun)	10
	6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Pengunjung)	16.122

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		Jumlah perpustakaan milik daerah (Unit)	0
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang baik berorientasi Pelayanan Publik	7. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	0
		Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUP (Dokumen)	2
		Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	91,50
		Opini audit BPK	WTP
		Peningkatan Level APIP	Level 3
		Nilai Persepsi (Skala 1-4)	3,00
		Tertatanya aset daerah (%)	95
		Sistem Informasi Manajemen Pemda (Aplikasi)	1
		Tersebarluaskannya Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Informasi	12
		Jumlah aparatur yang mengikuti diklat pengembangan (Orang)	461
		Jumlah aparatur yang terbina (Org)	11.025
		Rasio Kemandirian Daerah	12,19
		Jumlah prasarana aparatur pemerintahan terbangun dan tertata (Unit)	3
		Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Unit)	-
Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapatkan pelatihan (Orang)	540		

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (%)	84
		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (%)	86
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran (%)	49,00
		Ketersediaan database kependudukan (%)	97
		Terlaksananya Proses Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah (sertifikat)	7
3. Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan	8. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Investasi;	Jumlah Realisasi Investasi Berskala Nasional (%)	12,57
		Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional : - PMDN (Perusahaan) - PMA (Perusahaan)	3 1
		Presentase antara realisasi investasi & peminat investasi (%)	70
		Jumlah koperasi aktif (Unit)	740
		Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah : - Usaha Mikro - Usaha Kecil - Usaha Menengah	49.884 865 17
		Revitalisasi/ Pembangunan Pasar Daerah (Unit)	1

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		Jenis dan jumlah industri menengah: - Jenis industri - Jumlah industry	22 35
		Jenis dan jumlah industri kecil : - Jenis industri - Jumlah industri	24
	9. Meningkatnya Ketahanan pangan daerah;	Meningkatnya ketersediaan pangan pokok dan non pokok : - Padi (Ton)	
		- Palawija (Ton)	26.412
		- Hortikultura (Ton)	180.450
		Daerah rawan pangan (Kecamatan)	3
		Indeks Ketahanan Pangan	0,5
		Sentra kawasan unggulan (Lokasi)	3
		Produksi Daging (Kg)	8.847.772
		Produksi ikan budidaya (Ton)	3.576,00
		Produksi ikan tangkap (Ton)	5.726,70
		Konsumsi ikan (Kg per Kapita)	17,23
		Cakupan Bina Kelompok Tani: - Pemula - Lanjut - Madya - Utama	1.393 918 103 3

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
	10. Meningkatnya hasil produksi perkebunan dan kehutanan;	Meningkatnya produksi hasil hutan non kayu (5 % Pertahun) (Kg)	-
		Meningkatnya produksi hasil tanaman perkebunan (1 % pertahun) (Ton)	32.220,74
	11. Tumbuhnya industri pariwisata unggulan daerah.	Jumlah dan jenis obyek wisata (Lokasi/ODTW)	21
		Jumlah kunjungan wisatawan (Wisatawan)	500.000
4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas	12. Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan;	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang (%)	65,40
	13. Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya (%)	69,00
		Tersedianya Areal Konservasi Sumber Air (Embung) (Unit)	1
		(Ha)	5,50
		Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir	1
	14. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat;	Terbangunnya jalan perdesaan (Km)	120,00
		Jumlah fasilitas umum dan sosial terbangun dan tertata di kecamatan (Unit)	2
		Persentase cakupan air bersih (%)	82,27
		Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai (%)	62,00
	15. Meningkatnya kualitas perumahan permukiman	Tertatanya rumah sehat dan layak huni (Unit)	150

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		Pembangunan Fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan. a. Jalan Lingkungan b. Drainase Lingkungan	500
	16. Meningkatnya pemenuhan listrik masyarakat	Cakupan elektrifikasi (%)	-
		Terbangunnya jaringan listrik di	-
		Pemasangan PJU (Titik)	-
		Pemeliharaan PJU (Titik)	-
	17. Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ	Jumlah jenis rambu terpasang : - Rambu-rambu (Unit) - Lampu lalu lintas (Unit) - Utilitas Jalan (Unit) - Marka (M ²)	80 4 85 700
18. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan terbangun dan terpelihara (Unit)	0	
5. Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan	19. Meningkatnya rehabilitasi lahan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Hektar)	-
	20. Meningkatnya fungsi daerah tangkapan air	Meningkatnya daerah tangkapan air dan sumber-sumber air yang direhabilitasi : - Mata air (Unit) - Bendungan (Unit) - Sempadan sungai (Km)	10
	21. Terjaganya tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah di bawah ambang batas;	Tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah (%)	100
Jumlah perusahaan yang memiliki dan mematuhi AMDAL		30	

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
	22. Meningkatnya kuantitas pengelolaan sampah dan limbah	Persentase penanganan sampah (%)	32,5
	23. Pengendalian dan pemanfaatan ruang;	Proporsi Ruang Terbuka Hijau ter-hadap luas wilayah Perkotaan Kabupaten Lebak (%)	40
	24. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	86
		Cakupan penanggulangan korban bencana (%)	100
		Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (< 1 jam setelah pengaduan) (Kali)	12
6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah	25. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;	Tingkat penegakan perda (%)	90
		Jumlah Kegiatan pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat (%)	10
		Tertanganinya kasus Penyakit Masyarakat (Pekat) (%)	83,5
	26. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama di masyarakat	Meningkatnya peran FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) (Kegiatan)	2
		Terselenggaranya kegiatan keagamaan (Kegiatan)	4
		Terpeliharanya sarana dan prasarana MDTA yang disediakan (Ruang Kelas)	25
		Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Ormas)	120

4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2017

4.2.1 Tema RKP Tahun 2017

Pemerintah menetapkan Tema Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2017 yaitu :

“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah“

Tema tersebut dalam rangka mendukung pencapaian Visi Pembangunan Nasional 2015-2019:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"

Visi tersebut diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunanyaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Nasional pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat
2. Pembangunan Sektor Unggulan
3. Pemerataan dan Kewilayahan



4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
5. Pembangunan Ekonomi

4.2.2 Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2017

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2017, menetapkan tema pembangunan sebagai berikut :

“Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Peningkatan Infrastruktur Dasar Untuk Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Banten”

Selanjutnya dalam rangka perwujudan Tema tersebut, pemerintah Provinsi Banten menetapkan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017 yang dirumpukan menurut Agenda Pembangunan Daerah sesuai dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rancangan RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas tenaga kerjadan pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan
2. Pemantapan ketahanan pangan, peningkatan keamanan pangan, dan penguatan logistik pangan
3. Peningkatan konektivitas dan daya dukung infrastruktur terhadap ekonomi dan investasi yang lebih merata
4. Peningkatan akses promosi dan mutu pelayanan kesehatan
5. Pengendalian tata ruang, kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya air, mitigasi, serta adaptasi bencana
6. Pemantapan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan daerah dan suasana yang kondusif .

Keenam Prioritas Pembangunan Daerah tersebut untuk menjawab isu-isu strategis:

1. Pendidikan, dayasaing tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan
2. Ketahanan pangan daerah

3. Sarana infrastruktur yang mendukung ekonomi dan investasi
4. Akses promosi dan mutu pelayanan kesehatan
5. Tata ruang, kelestarian lingkungan hidup, sumberdaya air, dan kerawanan kebencanaan
6. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan serta penyelenggaraan Pilkada Banten

4.2.3 Tema dan Prioritas RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2017

Prioritas pembangunan tahun 2017 diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pembangunan dengan menjamin penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dan berdaya saing, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan kualitas kinerja birokrasi yang bersih, efektif dan efisien, serta menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Prioritas pembangunan tersebut sejalan dengan arah kebijakan RPJMD tahun 2014-2019. Berdasarkan landasan tersebut maka tema pembangunan daerah Kabupaten Lebak tahun 2017 yaitu

“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Peningkatan Kualitas Pembangunan”

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan.
2. Peningkatan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur
3. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Berbasis Potensi Lokal
4. Peningkatan Kinerja Birokrasi Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik.
5. Perlindungan Dan Pengelolaan Tata Ruang Serta Lingkungan Hidup

Kelima prioritas tersebut dirumuskan sebagai jawaban terhadap isu-isu strategis kabupaten lebak tahun 2017 yaitu :

1. Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Aksesibilitas Sarana Prasarana Pendidikan;
3. Aksesibilitas Sarana Prasarana Kesehatan;
4. Ketahanan Pangan Daerah;
5. Kemiskinan;
6. Pengangguran Dan Ketenagakerjaan;
7. Banjir Wilayah Perkotaan;
8. Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Wilayah ;
9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Kelestarian Lingkungan Hidup;
10. Pemilihan Gubernur Dan Bupati.

Dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, berikut table sinkronisasi Prioritas Pembangunan.

Tabel 4.3
Sinkronisasi Pembangunan Tahun 2017

Pusat	Provinsi Banten	Kabupaten Lebak
Pemberdayaan manusia dan masyarakat	a. Peningkatan kapasitas tenaga kerja dan pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan b. Peningkatan akses promosi dan mutu pelayanan kesehatan	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
Pembangunan sektor unggulan	Pemantapan ketahanan pangan, peningkatan keamanan pangan, dan penguatan logistik pangan	
Pemerataan dan kewilayahan	Pengendalian tata ruang, kelestarian lingkungan hidup dan	a. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas

Pusat	Provinsi Banten	Kabupaten Lebak
	sumber daya air, mitigasi, serta adaptasi bencana	Infrastruktur b. Perlindungan dan Pengelolaan Tata Ruang serta Lingkungan Hidup
Pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan	Pemantapan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan daerah dan suasana yang kondusif	Peningkatan Kinerja Birokrasi Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik.
Pembangunan ekonomi	Peningkatan konektivitas dan daya dukung infrastruktur terhadap ekonomi dan investasi yang lebih merata	Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Berbasis Potensi Lokal

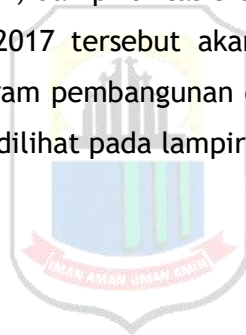


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan hasil dari formulasi rangkaian pembahasan pada bab sebelumnya, terutama mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019. Program dan kegiatan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang bersifat politik, teknokratik, partisipatif, *top down* dan *bottom up*.

Selanjutnya berdasarkan prioritas pembangunan daerah tersebut dijabarkan ke dalam 148 program pembangunan dengan rincian prioritas 1 terdiri dari 38 program, prioritas 2 mencakup 18 program, prioritas 3 mencakup 34 program, prioritas 4 mencakup 47 program, dan prioritas 5 terdiri dari 11 program. Program-program pembangunan tahun 2017 tersebut akan dijalankan oleh 61 Perangkat Kerja Daerah (PD). Daftar program pembangunan dan pagu indikatif sesuai dengan PD penanggungjawabnya dapat dilihat pada lampiran.



Tabel 5.1

Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2017

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM / PEMBANGUNAN		PAGU INDIKATIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1,211,130,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	75,628,648,575	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3	Program Pendidikan Non Formal	1,643,380,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		4	Program Pendidikan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5,124,280,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1,038,039,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		6	Program Pengembangan Nilai Budaya	613,095,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		7	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	2,457,095,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		8	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	670,295,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		9	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	8,269,000,000	Dinas Kesehatan
		10	Program Peningkatan dan Pengembangan BLUD	144,740,450,000	RSUD
		11	Program Pengawasan Obat dan Makanan	60,000,000	Dinas Kesehatan
		12	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	79,248,401,550	Dinas Kesehatan



No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM / PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KETERANGAN
		13 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	13,727,622,000	Dinas Kesehatan
		14 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1,109,075,000	Dinas Kesehatan
		15 Program Perbaikan Gizi Masyarakat	950,000,000	Dinas Kesehatan
		16 Program Pengembangan Lingkungan Sehat	542,880,000	Dinas Kesehatan
		17 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2,277,225,000	Dinas Kesehatan
		18 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1,002,000,000	Dinas Kesehatan
		19 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	241,160,000	Dinas Kesehatan
		20 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	17,633,500,000	Dinas Kesehatan
		21 Program peningkatan Pelayanan kesehatan Lansia	100,000,000	Dinas Kesehatan
		22 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1,139,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		23 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	50,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM / PEMBANGUNAN		PAGU INDIKATIF (Rp.)	KETERANGAN
		24	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	175,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		25	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	100,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		26	Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan	410,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		27	Program Keluarga Berencana	4,007,650,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		28	Program Pelayanan Kontrasepsi	725,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		29	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	175,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM / PEMBANGUNAN		PAGU INDIKATIF (Rp.)	KETERANGAN
		30	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KRR	50,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		31	Program Peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	50,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		32	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1,185,000,000	Dinas Sosial
		33	program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	100,000,000	Dinas Sosial
		34	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya	100,000,000	Dinas Sosial
		35	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	300,000,000	Dinas Sosial
		36	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1,170,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		37	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	4,354,200,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		38	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	600,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	JUMLAH 1				



No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM / PEMBANGUNAN		PAGU INDIKATIF (Rp.)	KETERANGAN
				372,978,126,325	
2	Peningkatan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1,063,817,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; DinasLingkungan Hidup
		2	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	3,450,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3	Program Pengembangan Perumahan	1,023,300,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		4	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya alam	2,721,920,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	Program Infrastruktur Permukiman Kumuh	1,800,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		6	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		7	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	115,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		8	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	19,937,367,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		9	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	121,613,482,375	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1,923,406,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM / PEMBANGUNAN		PAGU INDIKATIF (Rp.)	KETERANGAN
		11	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	66,423,848,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		12	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1,445,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
		13	Program peningkatan pelayanan angkutan	630,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
		14	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
		15	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	2,041,254,000	DINAS PERHUBUNGAN
		16	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	455,100,000	DINAS PERHUBUNGAN
		17	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	23,252,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		18	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	910,650,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	JUMLAH 2			249,506,545,475	
3	Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Berbasis Potensi Lokal	1	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	542,240,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan



No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM / PEMBANGUNAN		PAGU INDIKATIF (Rp.)	KETERANGAN
		2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian / Perkebunan)	7,319,829,975	Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Sekretariat Daerah
		3	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1,722,817,525	Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan
		4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1,675,263,250	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		5	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	6,816,478,700	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		6	Program pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan Lapangan	1,558,994,750	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		7	Program pengembangan budidaya perikanan	1,596,650,000	Dinas Perikanan
		8	Program Pengembangan sistem perikanan Tangkap	902,000,000	Dinas Perikanan
		9	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	441,950,000	Dinas Perikanan
		10	Program Pengembangan Data/Informasi	1,299,600,000	Bappeda; Dinas PUPR; Dinas Perkim & Pertanahan; Dinas Sosial; DPPKBP3A; Dinkop & UKM; Disnakertrans; Disperindag
		11	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1,750,000,000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		12	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	400,000,000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan



No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM / PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KETERANGAN
		13 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	305,000,000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		14 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	7,345,606,000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	923,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		16 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	764,880,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		17 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		18 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	610,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		19 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1,429,798,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , SEKRETARIAT DAERAH
		20 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1,729,400,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , SEKRETARIAT DAERAH
		21 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	494,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	3,251,500,000	Dinas Peternakan
		23 Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak	1,118,170,000	Dinas Peternakan
		24 Program Peningkatan pemasaran hasil produksi Peternakan	234,356,000	Dinas Peternakan



No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM / PEMBANGUNAN		PAGU INDIKATIF (Rp.)	KETERANGAN
		25	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	425,000,000	Dinas Peternakan
		26	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	350,000,000	Dinas Sosial
		27	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1,670,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		28	Program peningkatan kesempatan kerja	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		29	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	298,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		30	program pengembangan wilayah transmigrasi	155,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		31	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	325,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
		32	Program pengembangan pemasaran pariwisata	1,875,000,000	Dinas Pariwisata
		33	Program Pengembangan Kemitraan	50,000,000	Dinas Pariwisata
		34	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1,625,000,000	Dinas Pariwisata
	Jumlah 3			51,405,534,200	
4	Peningkatan Kinerja Birokrasi Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik.	1	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	275,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM / PEMBANGUNAN		PAGU INDIKATIF (Rp.)	KETERANGAN
		2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4,751,652,750	Semua SKPD
		3	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1,752,260,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Perikanan; dan Dinas Ketahanan Pangan
		8	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	1,200,000,000	Bappeda
		9	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	662,729,600	Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pertanian dan Perkebunan; dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		10	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		11	Program Kerjasama Pembangunan	424,600,000	Sekretariat Daerah; dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		12	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3,060,670,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		13	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1,550,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		14	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	110,000,000	Sekretariat Daerah
		15	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1,005,875,000	Sekretariat Daerah

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM / PEMBANGUNAN		PAGU INDIKATIF (Rp.)	KETERANGAN
		16	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	11,191,931,800	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah; dan Sekretariat Daerah
		17	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,585,325,000	Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Sekretariat Daerah; dan Inspektorat
		18	Program pemantapan otonomi daerah dan sistem administrasi daerah	1,835,804,900	Sekretariat Daerah
		19	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	53,609,400	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		20	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3,241,980,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		21	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	22,102,402,000	Sekretariat DPRD
		22	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2,334,463,000	Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
		23	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1,325,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika



No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM / PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KETERANGAN
		24 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	1,355,000,000	Sekretariat Daerah
		25 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	5,189,213,000	Inspektorat Daerah
		26 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	256,592,000	Inspektorat Daerah
		27 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	54,450,000	Inspektorat Daerah
		28 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3,206,000,000	Kantor Kesbangpol Linmas; dan Satuan Polisi Pamong Praja
		29 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja,
		30 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	5,488,550,000	Sekretariat Daerah dan Kantor Kesbang Linmas;
		31 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	225,500,000	Kantor Kesbang Linmas;
		32 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	75,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
		33 Program Pendidikan Politik Masyarakat	1,011,042,000	Kantor Kesbang Linmas;



No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM / PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KETERANGAN
		34 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	180,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		35 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	200,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		36 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	460,650,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		37 Program Penataan Daerah Otonomi Baru	660,000,000	Sekretariat Daerah; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		38 Program Peningkatan pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	913,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		39 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	810,835,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kecamatan
		40 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	699,700,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		41 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1,870,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		42 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	59,392,503,900	Semua SKPD
		43 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15,758,261,500	Semua SKPD



No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM / PEMBANGUNAN		PAGU INDIKATIF (Rp.)	KETERANGAN
		44	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4,721,013,850	Semua SKPD
		45	Program Pemerintahan Umum Daerah	7,904,809,500	Semua SKPD
		46	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3,579,899,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan Satuan Polisi Pamong Praja
		47	Program Peningkatan disiplin Aparatur	673,080,000	Seluruh SKPD
	JUMLAH 4			173,398,403,200	
5	Perlindungan Dan Pengelolaan Tata Ruang Serta Lingkungan Hidup	1	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	230,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1,679,344,800	Dinas Lingkungan Hidup
		3	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	741,555,000	Dinas Lingkungan Hidup
		4	Program Lingkungan Sehat Perumahan	3,000,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		5	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1,854,912,000	BPBD



No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM / PEMBANGUNAN		PAGU INDIKATIF (Rp.)	KETERANGAN
		6	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	470,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
		7	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	488,145,000	Dinas Lingkungan Hidup
		8	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	114,545,000	Dinas Lingkungan Hidup
		9	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5,011,889,000	Dinas Lingkungan Hidup
		10	Program Pengendalian Banjir	2,407,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		11	Program Perencanaan Tata Ruang	175,000,000	Bappeda
JUMLAH 5				16,172,390,800	
JUMLAH 1+2+3+4+5				863,461,000,000	



BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak tahun 2017, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD - P) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019, dengan tetap mensinergiskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2017.

RKPD Tahun 2017 yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2017, untuk kemudian digunakan sebagai acuan dalam Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017.



BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/ttd.

DEDE JAELANI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

LINA BUDIARTI, S.H.
NIP. 19810228 220502 2 005